

**EFEKTIVITAS DIPLOMASI INDONESIA
[Studi: Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda Dalam
Mencapai Kepentingan Pertahanan Indonesia]**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**RENDY FILOVIA
07041281621175**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EFEKTIVITAS DIPLOMASI INDONESIA (STUDI: KERJASAMA BILATERAL INDONESIA BELANDA DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN PERTAHANAN INDONESIA)

SKRIPSI

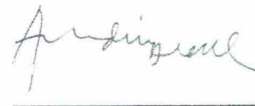
Disusun oleh:

RENDY FILOVIA
07041281621175

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 31 Januari 2021

Pembimbing I

Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 196012241990011001



Pembimbing II

Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
NIP. 199208272019031005



Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M.
NIP. 196504271989031003



HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

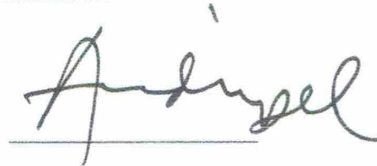
EFEKTIVITAS DIPLOMASI INDONESIA [STUDI: KERJASAMA BILATERAL INDONESIA- BELANDA DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN PERTAHANAN INDONESIA]

SKRIPSI

Telah memperbaiki skripsi dengan petunjuk dari Tim Penguji dalam
Sidang Ujian Skripsi sebagaimana tertulis dalam "Hasil Ujian Skripsi"
Pada Tanggal 18 Maret 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

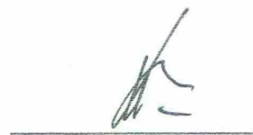
Dr. Andy Alfatih, MPA
Ketua



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
Anggota



Dra. Retno Susilowati, M.M
Anggota



Abdul Halim, S.IP., M.A
Anggota



Indralaya, Maret 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

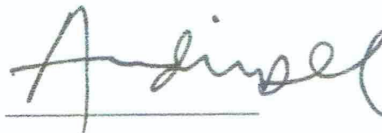
EFEKTIVITAS DIPLOMASI INDONESIA [STUDI: KERJASAMA BILATERAL INDONESIA- BELANDA DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN PERTAHANAN INDONESIA]

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 Maret 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Andy Alfatih, MPA
Ketua



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
Anggota



Dra. Retno Susilowati, M.M
Anggota



Abdul Halim, S.IP., M.A
Anggota



Indralaya, Maret 2021

Mengesahkan,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sriwijaya

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP.196311061990031001



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu saya yang telah menghantarkan saya sampai pada fase ini. Terimakasih atas doa, pengorbanan atas waktu, materi dan perasaan yang tak terhitung jumlahnya dan tak dapat terbalaskan nilai-nya.
2. Almamater Tercinta, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

INTI SARI

EFEKTIVITAS DIPLOMASI INDONESIA [Studi: Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda Dalam Mencapai Kepentingan Pertahanan Indonesia]

Oleh:

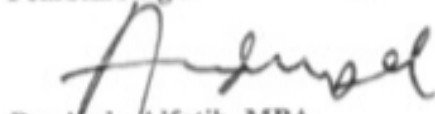
Rendy Filovia

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Sriwijaya**

Indonesia dan Belanda menjalin hubungan Kerjasama pertahanan melalui kesepakatan atas nota kesepahaman terkait kerjasama pertahanan pada tahun 2014 di Belanda. Belanda merupakan negara yang memiliki reputasi yang baik di bidang perairan dan penggalangan kapal, sehingga dipahami bahwa keputusan untuk menjalin Kerjasama dengan Belanda merupakan keputusan yang cukup relevan, tetapi terdapat hal lain yang perlu dipertanyakan tentang bagaimana keefektifitasan diplomasi kerjasama pertahanan dengan Belanda yang merupakan negara dengan kekuatan militer jauh dibawah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mencapai kepentingan pertahanan melalui kerjasama pertahanan antara negara Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan Konsep Diplomasi Pertahanan menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster yang menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan memiliki tujuan dan sasaran untuk; (a) *Kerjasama strategis*; (b) *promosi hubungan demokratis sipil-militer* dan; (c) *meningkatkan kapabilitas dalam menjaga perdamaian*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama pertahanan yang berlangsung sejak tahun 2014 berlangsung cukup efektif dengan melihat dimensi Kerjasama strategis yang berjalan cukup baik, promosi hubungan demokratis sipil-militer yang cukup baik, dan pengembangan kapabilitas dalam menjaga perdamaian berjalan dengan cukup baik

Kata Kunci: Efektivitas, Diplomasi Pertahanan, Indonesia dan Belanda

Pembimbing I



Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 196012241990011001

Pembimbing II



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
NIP.199208272019031005

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL. D
NIP.196504271989031003

ABSTRACT

EFEKTIVITAS DIPLOMASI INDONESIA [Studi: Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda Dalam Mencapai Kepentingan Pertahanan Indonesia]

Oleh:

Rendy Filovia

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Sriwijaya**

Indonesia and Netherlands established the relation of defence cooperation through an agreement on a memorandum of understanding related to defence cooperation on 2014 in Netherlands. Netherlands is a country that has a good reputation in the field of waters and shipbuilding, so it is can be understood that the decision to cooperate with Netherlands was a relevant action, but there is another thing need to be questioned about how effective the diplomacy of defence cooperation with Netherlands which is the country military strength ranked far below from Indonesia. The research aims to find out about how is the effectiveness of diplomacy that carried out by Indonesia in achieving the defence interest of Indonesia through the defence cooperation between Indonesia and Netherlands. This research used the concept of defence diplomacy according to Andrew Cottey and Anthony Forster which explains the defence diplomacy has goals and objectives for; (a) strategic engagement; (b) promoting democratic civil-military relations and; (c) enchancing the peacekeeping capabilities. The method used in this research is descriptive qualitative research method. The result of this research shows that the defence cooperation that has been taking place since 2014 been effectively occurred by looking at the dimension of strategic engagement that has occurred quite effective, the promotion of democratic civil-military relation is quite effective, and the enchancement of peacekeeping capabilities is quite effective.

Keyword: *Efectiveness, Defence Diplomacy, Indonesia and Netherlands*

Advisor I



Dr. Andy Alfatih, MPA

NIP. 196012241990011001

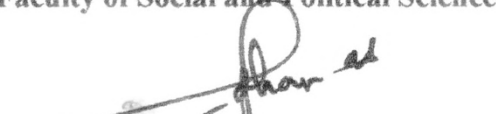
Advisor II



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A

NIP.199208272019031005

**Head of International Relations Science Study Program
Faculty of Social and Political Sciences**



Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D

NIP.196504271989031003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendy Filovia
NIM : 07041281621175
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Efektivitas Diplomasi Indonesia Studi: Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda dalam Mencapai Kepentingan Pertahanan Indonesia*" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Inderalaya 31 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Rendy Filovia
07041281621175

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Efektivitas Diplomasi Indonesia Studi: *“Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda Dalam Mencapai Kepentingan Pertahanan Indonesia”*”.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan anugerah yang senantiasa diberikan.
2. Kedua orangtua saya yang telah menghantarkan saya sampai pada tahap ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus Dekanat lainnya.
5. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LLM dan Dra. Retno Susilowati, MM selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Dr. Andy Alfatih MPA selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktunya selama bimbingan, arahan, saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A selaku dosen Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran yang sangat bermafaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dra. Retno Susilowati, M.M selaku pembimbing akademik dan juga selau dosen Penguji yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran yang sangat berguna selama masa perkuliahan saya.
9. Bapak Abdul Halim, S.IP., M.A selaku dosen Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran yang berharga untuk meningkatkan tulisan saya.
10. Mbak Siska dan Ka Dimas, selaku admin prodi Ilmu Hubungan Internasional yang selalu siap sedia dan responsif dalam membantu urusan akademik mahasiswa.

11. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu dan dedikasinya selama perkuliahan dan para Staff Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala keperluan administrasi selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
12. Angkatan 2016 Batic's Universitas Sriwijaya, yang senantiasa mendampingi kehidupan selama perkuliahan dan segala keluh kesah di dalamnya. Terimakasih Anastasia Gultom, Sartika Manurung, Doddy Hutasoit, Freddy Lumbanbatu, Sarah Simarmata, Tanti Malau, Pariama Sinaga, Yoseph Simbolon, Benny Banjarnahor, Pasrah Lumbangaol, Hendy Sinurat, Elisabeth Sitompul, Christine Tampubolon, Sonya Simatupang.
13. Bapak Novera B Lesmana selaku Atase Pertahanan Republik Indonesia-Belanda di Den Haag, yang juga menjadi Informan dalam memberikan informasi dan juga data terkait aktivitas hubungan pertahanan.
14. Bapak Dr. TB Hasanuddin yang merupakan Anggota Komisi I DPR RI, telah memberikan informasi terkait hubungan pertahanan Republik Indonesia dan Belanda
15. Bapak Ikhwan Solihan selaku KASI EROPA Kementerian Pertahanan RI, yang telah memberikan informasi dan data penunjang terkait hubungan Kerjasama pertahanan Republik Indonesia dan Belanda
16. Bapak Andre Norman Akbar, selaku Kasubdit, Eropa I, Kementerian Luar Negeri dan juga Ibu Aisyah Alamanda, yang merupakan atas saya di tempat magang di Kemlu, yang telah membantu saya dalam memperoleh berbagai data penelitian dan juga ilmu yang telah diberikan selama saya magang di Kemlu
17. Teman-teman dan Saudara-saudara terkasih yang sangat berharga yang selalu membantu, mendukung dan memotivasi untuk terus berusaha, berjuang, dan menjadi pendorong semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas budi baik kalian dan memberikan berkah kepada kita semua, Amin.

Indralaya, 1 April 2021

Rendy Filovia
07041281621175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
INTI SARI.....	vi
.....	vii
ABSTRACT	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.1.1. Gambaran Keadaan Pertahanan Republik Indonesia Pada Bidang Alutsista.....	4
1.1.2. Masih Adanya Permasalahan Pada Kualitas Sumber Daya Manusia Tentara Nasional Indonesia (TNI)	5
1.1.3. Dinamika Pertahanan Regional Kawasan Asia Tenggara.....	6
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	9
1.3. BATASAN MASALAH	10
1.4. TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.5. MANFAAT PENELITIAN	10
1.5.1. Manfaat Teoritis	10
1.5.2. Manfaat Praktis	10
1.6. TINJAUAN PUSTAKA	11
1.6.1. KEPENTINGAN NASIONAL PERTAHANAN PADA BIDANG PEMBANGUNAN KERJASAMA INTERNASIONAL INDONESIA	14
1.6.2. EFEKTIVITAS	16
1.6.3. DIPLOMASI.....	18
1.6.4. DIPLOMASI PERTAHANAN.....	22
1.6.5. KONSEP-KONSEP MENGENAI DIPLOMASI PERTAHANAN	24
1.7. KONSEP DIPLOMASI PERTAHANAN YANG DIGUNAKAN PADA PENELITIAN INI.....	28
1.8. KERANGKA KONSEPTUAL.....	29
1.9. KERANGKA PEMIKIRAN	30

1.10. HIPOTESIS DESKRIPTIF	34
1.11. METODE PENELITIAN	34
1.11.1. Jenis Penelitian	34
1.11.2. Definisi Konseptual	34
1.11.3. Fokus Penelitian	35
1.11.4. Jenis dan Sumber Data	39
1.11.5. Teknik Pengumpulan Data	40
1.11.6. Teknik Keabsahan Data	40
1.11.7. Teknik Analisis Data	41
BAB II.....	43
KERJASAMA INDONESIA DAN BELANDA DI BIDANG PERTAHANAN	43
2.1. SEJARAH KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA DAN BELANDA SEBELUM ADANYA NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA-BELANDA TAHUN 2014-2019	49
2.2. KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA DAN BELANDA SETELAH ADANYA NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA PERTAHANAN INDOENSIA- BELANDA TAHUN 2014-2019	52
2.3. KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA-BELANDA “Memorandum of Undestanding Between the Ministry of Defence of The Republic of Indonesia And The Ministry of Defence of The Netherlands on Defence-Related Cooperation”.....	53
2.4. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA	56
2.5. KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA	57
BAB III	60
EFEKTIVITAS DIPLOMASI INDONESIA DALAM KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN BELANDA	60
1.1. KERJASAMA STRATEGIS INDONESIA DAN BELANDA.....	61
1.1.1. Komitmen Kerjasama.....	62
1.1.2. Transparansi Militer	64
1.1.3. Membangun Persamaan Persepsi Kepentingan Bersama	67
1.1.4. Perubahan Pola Pikir dalam Kerjasama	70
1.1.5. Sosialisasi Kegiatan Kerjasama Militer	74
1.1.6. Asistensi Kerjasama Militer	76
1.2. MEMPROMOSIKAN NILAI DEMOKRASI PADA HUBUNGAN MILITER DAN SIPIL 86	
1.2.1. Pengendalian Politisi Sipil Terhadap Militer	88
1.2.2. Pengendalian Demokratis Sipil Terhadap Kebijakan Pertahanan.....	91
1.2.3. Pengawasan Lembaga Legislatif.....	94
1.2.4. Peraturan Hukum Berlandaskan Keadilan sosial dan Kemanusiaan.....	97
1.2.5. Keterkaitan Lembaga Sipil.....	100
1.3. KAPABILITAS MENJAGA PERDAMAIAN	107
1.3.1. Melibatkan Kerjasama Militer Pada Isu Perdamaian.....	108
1.3.2. Mendorong Nilai-nilai Kemanusiaan dan Keadilan Pada Kebijakan Kerjasama Pertahanan. 110	
BAB IV.....	114
PENUTUP	114
4.1. KESIMPULAN.....	114
4.2. SARAN.....	115

DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Gambaran Alutsista Sektor Maritim Republik Indonesia	5
Tabel 1. 2 Aktifitas Perkembangan Pertahanan.....	7
Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 1. 4 Tingkat Efektifitas	17
Tabel 1. 5 Tiga Bentuk Power/Kekuatan Menurut Nye	20
Tabel 1. 6 Aktifitas Diplomasi Pertahanan.....	26
Tabel 1. 7 Fokus Penelitian	36
 Tabel 2. 1 Kapal Yang Dibeli Indonesia Dari Belanda	 50
 Tabel 3. 1 Perbandingan Kapabilitas Militer Indonesia dan Belanda (2020).....	 44
Tabel 3. 2 Komitmen Kerjasama	63
Tabel 3. 3 Transparansi Kerjasama	65
Tabel 3. 4 Persepsi Kerjasama Pertahanan	67
Tabel 3. 5 Perubahan Pandangan Negatif ke Arah Positif	71
Tabel 3. 6 Sosialisasi Kerjasama Pertahanan	74
Tabel 3. 7 Asistensi Kerjasama Militer	77
Tabel 3. 8 Indikator Kerjasama Strategis	81
Tabel 3. 9 Pengendalian Politis Sipil Atas Militer	89
Tabel 3. 10 Pengendalian Demokratis Sipil Terhadap Militer	92
Tabel 3. 11 Pengawasan Lembaga Legislatif	95
Tabel 3. 12 Peraturan Hukum Berlandaskan Keadilan Sosial dan Kemanusiaan	98
Tabel 3. 13 Keterkaitan Lembaga Sipil	101
Tabel 3. 14 Promosi Hubungan Demokratis Sipil-Militer	103
Tabel 3. 15 Kerjasama Militer pada Isu Perdamaian.....	108
Tabel 3. 16 Komitmen Terhadap Nilai Kemanusiaan dan Keadilan	110
Tabel 3. 17 Kapabilitas Pemeliharaan Perdamaian	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Model soft power dalam mempengaruhi target	21
Gambar 1. 2 Diplomasi Pertahanan sebagai tindakan Soft Power	23
Gambar 1. 3 Alur Pemikiran.....	33
Gambar 1. 4 Teknik Analisis Data Kualitatif Efektivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia [Studi Terhadap Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda dalam Mencapai Kepentingan Pertahanan Indonesia] (Sumber: Miles dan Huberman, p.19).....	42
 Gambar 3. 1 Alokasi militer berdsarkan GDP/PDB Negara (Tahun 2014-2016)	46
Gambar 3. 2 Rasio alokasi PDB pengeluaran Militer (Indonesia)	47
Gambar 3. 3 Rasio alokasi PDB bagi pengeluaran Militer (Belanda).....	48

DAFTAR SINGKATAN

1.	AD	: Angkatan Darat
2.	AL	: Angakatan Laut
3.	Alutsista	: Alat utama sistem persenjataan
4.	AS	: Amerika Serikat
5.	ASN	: Aparatur Sipil Negara
6.	ATAT	: Army-to-Army Talks
7.	AU	: Angkatan Udara
8.	BATLS	: Battlefield Advance Trauma Life Support
9.	BIUPAMA	: Basis-cursus Infectieziekten en Uitheemse Pathologie
10.	BNN	: Badan Narkotika Nasional
11.	BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
12.	BNPT	: Netherlands Institute of Military History
13.	BPPK	: Badan Pengkajian dan Pengembangan
14.	CBM	: Confidence Building Measure
15.	CGI	: Consultative Group of Indonesia
16.	CRPD	: Committee on the Right of Person with Disabilities
17.	CSIS	: Center for Strategic and International Study
18.	CTF	: Commander Task in Force
19.	DCA	: Defence Cooperation Agreement
20.	Ditjen	: Direktorat Jenderal
21.	DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
22.	DSNS	: Damen Schelde Naval Shipbuilding
23.	FGD	: Forum Group Discussion
24.	GDP	: Gross Domestic Product
25.	GFP	: Global Fire Power
26.	HAM	: Hak Asasi Manusia
27.	IGGI	: Inter-Governmental Group of Indonesia
28.	IMO	: International Maritime Organization
29.	IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
30.	ITLOS	: International Tribunall for the Law of the Sea
31.	Kemhan	: Kementerian Pertahanan
32.	Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
33.	KRI	: Kapal Republik Indonesia
34.	Kuathan	: Kekuatan Pertahanan
35.	Lemhanas	: Lembaga Pertahanan Nasional
36.	Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
37.	MEF	: Minimum Essential force
38.	MoU	: Memorandum of Understanding
39.	MRC	: Military Rehabilitation Centre
40.	MTF	: Military Task Force
41.	NCTV	: National Coordinator for Security and Counter-Terrorism
42.	NIST	: Netherland Indonesia Strategic Talks
43.	NODC	: Netherland Defence Orientation Course
44.	NRI	: Negara Republik Indonesia
45.	NTNT	: Navy-to-Navy Talks
46.	PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa

- 47. PDB : Produk Domestik Bruto
- 48. PKR : Perusak Kawal Rudal
- 49. PNS : Pegawai Negeri Sipil
- 50. PT.PAL : Perseroan Terbatas Penataran Angkatan Laut
- 51. PWO : Principal Warfare Officer
- 52. RI : Republik Indonesia
- 53. RNLN : Royal Netherlands Navy
- 54. SIPRI : Stockholm International Peace Research Institute
- 55. SOM : Senior Official Meeting
- 56. TNI : Tentara Nasional Indonesia
- 57. ToT : Transfer of Technology
- 58. UN : United Nations
- 59. UNIFIL : United Nation Interim-Force in Lebanon
- 60. UNMEOM : United Nations Military Experts on Mission
- 61. UNMOC : United Nations Military Observer Course
- 62. UUD : Undang-undang Dasar
- 63. ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengembangan bidang pertahanan seperti alutsista dan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan memiliki hubungan erat dengan aktifitas diplomasi pada bidang kerjasama pertahanan. Fris menjelaskan, aktifitas pengembangan pertahanan dan kekuatan bersenjata saat ini telah menyeimbangkan usahanya ke arah yang proaktif, aktifitas perjanjian jangka panjang, membangun rasa saling percaya untuk mencapai pengakuan yang mengarah pada usaha pencegahan konflik, perkembangan tersebut selanjutnya dikenal dengan *defence diplomacy* (Fris, 2013, p. 7). Praktek diplomasi yang bergerak pada bidang pertahanan dapat dilihat pada hubungan Indonesia dengan negara asing, Gindarsih mengatakan bahwa Indonesia menjalin hubungan kerjasama pertahanan bilateral dengan beberapa negara yaitu: Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, China, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Brunei, Turki, yang merupakan daftar negara teratas yang menjalin hubungan bilateral dalam diplomasi pertahanan (Gindarsah, 2015, p. 16).

Belanda merupakan mitra atau partner komprehensif yang melakukan kerjasama di berbagai bidang dan sudah berlangsung cukup lama, pada penelitian ini penulis berfokus pada hubungan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Belanda. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda telah terjalin sejak lama, dan hubungan bilateral antara keduanya juga memiliki fondasi yang kuat, khususnya sejak tahun 2005 pemerintah Belanda mengakui secara moral dan politik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan terdapat paling tidak 74 perjanjian bilateral yang ditandatangani sejak 1952 – 2018 (Abraham et al., 2019, pp. 2–5). Hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda yang telah berlangsung sejak cukup lama, menghasilkan

cukup banyak jumlah perjanjian yang telah disepakati. Kerjasama Bilateral antara Indonesia dan Belanda telah menyepakati *Joint Declaration by The Government of The Republic of Indonesia And the Government of Netherlands On A Comprehensive Partnership*, pada tahun 2013, didalamnya terdapat butir-butir kesepakatan yang diharapkan untuk mengambil tindakan nyata dalam maksud merealisasikan kesepakatan tersebut, terangkum bagian kerjasama di bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) *International Affairs*
- 2) *Political and Security Cooperation*
- 3) *Economic and Sustainable Develeopement Cooperation*
- 4) *Socio-culutral and Other Areas of Cooperation*

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Belanda kemudian berkembang salah satunya di bidang kerjasama pertahanan pada tahun 2014 yang kemudian di sepakatilah sebuah **nota kesepahaman/memorandum of understanding (MoU)**, nota kesepahaman ini menjadi batasan dalam penelitian penulis untuk membahas keberhasilan yang tercapai dalam usaha diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Belanda yaitu, kerjasama pertahanan yang termasuk di dalam cakupan kerjasama pada nota kesepahaman tersebut. MoU atau Nota Kesepahaman ini membahas tentang kesepahaman pada kerjasama pertahanan. Kerjasama yang terlampir pada nota kesepahaman menyebutkan ruang lingkup kerjasama yaitu sebagai berikut (RI, 2014, pp. 2–3):

- 1) Dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional
- 2) Pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari Lembaga masing-masing para pihak
- 3) Kerjasama materiil pertahanan
- 4) Berbagi informasi dan/atau pengalaman, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Hukum militer dan sejarah militer,
 - b) Pengendalian krisis, penanggulangan bencana dan kegiatan pencarian dan penyelamatan,

- c) Ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk alih teknologi di bidang yang menjadi kepentingan bersama,
 - d) Intelijen militer, dan
 - e) Keamanan maritim, kontra-terorisme, dan bantuan kemanusiaan serta penanggulangan bencana.
- 5) Pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga angkatan bersenjata dari kedua negara, serta pengembangan kerjasama dalam bidang sebagai berikut:
- a) Pendidikan, pelatihan dan latihan,
 - b) Kunjungan kapal,
 - c) Logistik, dan
 - d) Operasi pemeliharaan perdamaian.
- 6) Peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada Lembaga-lembaga pertahanan dari para pihak melalui pendidikan, pelatihan, dan latihan
- 7) Bidang-bidang lain yang disepakati bersama.

Fenomena kerjasama antar negara yang saat ini kita lihat menunjukkan bahwa pendapat mengenai perubahan politik internasional menghadapi negara untuk melakukan kerjasama internasional untuk menjaga perdamaian dan kestabilan global. Holsti mengatakan bahwa pondasi perdamaian pada pandangan liberal klasik terletak pada susunan internal negara dan hubungan antar masyarakat dalam mengatur hubungan diplomatik antar negara. Ini menyimpulkan secara tidak langsung perdamaian tidak memungkinkan bila praktek otoriter dan totaliter berkuasa, atau pada sebaliknya mengusulkan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi di dalam demokrasi (Holsti, 2016, p. 176). Liberalis memandang positif *human nature*, dan meyakini bahwa hubungan internasional lebih bersifat kooperatif daripada konflikual, dan percaya terhadap kemajuan (Robert Jackson, 2013, p. 99). Peran dan tugas kekuatan militer untuk memperluas kekuasaan, telah berubah ke arah peran kekuatan militer sebagai alat untuk pencegahan konflik. Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia berkenaan dengan Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015, yang menjelaskan bahwa Indonesia perlu melakukan kerjasama untuk

meningkatkan kapabilitas pertahanannya, dan melihat arah pembangunan pertahanan negara yang diselenggarakan untuk mewujudkan pertahanan militer dan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Pasifik dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjaga kepentingan nasional (Kemhan RI, 2015, p. 38). Demi mencapai terwujudnya keinginan Indonesia dalam mengembangkan kekuatan maritim yang bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional, maka diperlukan pengembangan alutsista dan kualitas atau profesionalitas sumber daya manusia melalui kerjasama pertahanan dengan negara lain baik dalam cakupan bilateral maupun multilateral, karena keadaan alutsista dan kualitas sumberdaya manusia sangat perlu di kembangkan.

1.1.1. Gambaran Keadaan Pertahanan Republik Indonesia Pada Bidang Alutsista

Indonesia memiliki jumlah wilayah yang cukup besar dan terdiri dari ribuan pulau, dan tentu saja memiliki jumlah wilayah perairan/maritim yang cukup luas sehingga menjadi kepentingan negara untuk menaruh perhatian dalam menjaga keamanan dan kestabilan pada wilayah kedaulatan Indonesia. Kementerian Pertahanan mendorong terciptanya kemandirian pada industri pertahanan untuk terus memenuhi kebutuhan pertahanan, yang menjadi strategi pertahanan pada Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2015 yang menjelaskan bahwa, strategi pertahanan semesta (*total war*) tetap mengacu pada pembangunan sistem pertahanan negara yang dibangun melalui skala prioritas yaitu: peningkatan profesionalitas TNI, penyiapan pengembangan kekuatan rakyat, dan pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista (Kemhan RI, 2015, pp. 50–51). Mengutip hasil publikasi rapat koordinasi teknis Ditjen KUATHAN (Kekuatan Pertahanan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memaparkan bahwa pada tahun 2019 pembangunan MEF (*minimum essential force*) tahap II pencapaian baru berada pada 63,19% dari target 75,54% yang memiliki selisih 12,35%, yang akan diteruskan pada MEF tahap III untuk tahun 2020-2024

dan selanjutnya akan menyusun strategi untuk mendorong pemenuhan target dari MEF (Kemhan RI, 2020, p. 1).

Kerjasama antara Indonesia dan Belanda salah satunya ialah pada pengembangan kerjasama pada bidang pembuatan kapal perang, sehingga penulis hanya melampirkan alutsista di sektor maritim yang terkait pada kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Belanda, dan berikut merupakan tambahan informasi mengenai ketersediaan alutsista maritim yang dimiliki oleh Indonesia:

Tabel 1. 1 Gambaran Alutsista Sektor Maritim Republik Indonesia

NO	ALUTSISTA TNI	Jumlah	KETERANGAN
1.	Kapal Fregat/perusak	7	belum cukup untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang begitu luas, diperoleh dari pembelian dan produksi bersama
2.	Kapal Korvet/kapal kecil perusak	24	diperoleh dari hasil pembelian
3.	Mine Warfare/Kapal pendeteksi ranjau laut	10	belum dapat optimal dalam menjaga wilayah perairan Indonesia
4.	Submarine/kapal selam	5	Masih belum memenuhi kebutuhan pertahanan perairan Indonesia
5.	Sea Patrol/kapal patroli laut	156	Cukup banyak, tetapi kapal ini tidak memiliki kapabilitas untuk bertempur.

Sumber: Global Fire Power Index, 2020

1.1.2. Masih Adanya Permasalahan Pada Kualitas Sumber Daya Manusia

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam mendorong kapabilitas pertahanan, sehingga rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menghambat perkembangan kapabilitas pertahanan, kekuatan militer Indonesia mengutip dari website Global Fire Power Index, Indonesia yang menempati posisi ke-16 kekuatan militer dan memiliki kekuatan personel militer sebanyak 130,868,127 orang, dengan beberapa rincian seperti 108,620,524 orang non-militer siap untuk maju berperang apabila diperlukan, 400 ribu prajurit militer yang aktif dan 400 ribu prajurit cadangan (Global Fire Power, 2020, p.

1). Melihat kualitas dan kuantitas TNI masih belum optimal sehingga diperlukan pengembangan sumber daya manusia atau tingkat profesionalitas TNI. Dzikri dalam penelitiannya mengambil contoh pada TNI AD melalui data wawancara beliau yang menemukan bahwa permasalahan pengembangan kualitas TNI terdapat pada pemenuhan kebutuhan litbang baru mencapai 70%-80% dan pada segi kualitas ditemukan bahwa latar belakang kemampuan teknis tidak memenuhi kebutuhan, sementara Litbang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis seperti sarjana teknologi dan sains (Dzikri, 2016, p. 141).

1.1.3. Dinamika Pertahanan Regional Kawasan Asia Tenggara

Dinamika pertahanan pada wilayah regional Indonesia menjadi hal yang menurut penulis jadi sebuah alasan kenapa hubungan bilateral kerjasama Indonesia perlu dikembangkan pada bidang kerjasama pertahanan dan keamanan, mengingat semakin meningkatnya aktivitas militer di kawasan Laut China Selatan yang di picu dengan adanya tindakan China yang pada sengketa wilayah perairan Laut China Selatan, dimana negara-negara yang berada di wilayah Laut China Selatan merasa tindakan China melanggar peraturan Internasional (Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE) sehingga negara-negara yang berada pada wilayah Laut China Selatan melakukan peningkatan kapabilitas pertahanan mereka. Smith menjelaskan dinamika pertahanan di wilayah Asia meningkat secara drastis termasuk juga India sepanjang tahun 2016 sampai 2020. Peningkatan pengeluaran pertahanan meningkat 50% dalam 5 tahun dan mencapai 250 triliun dolar. Ini menjadi hal yang sangat mencolok dengan melihat tidak adanya konflik antar negara di kawasan selama 40 tahun belakangan. Berikut informasi singkat negara yang melakukan peningkatan kapabilitas pertahanan (M. Smith, 2018, pp. 29–31):

Tabel 1. 2 Aktifitas Perkembangan Pertahanan

No	Negara	Keterangan
1.	Singapura	Melakukan pembelian 8 kapal tempur pesisir dan 2 kapal selam pada tahun 2016
2.	Malaysia	Membentuk korps militer baru untuk menjaga wilayah ZEE dari nelayan China, dan 2015 meningkatkan intensitas patroli laut.
3.	Indonesia	Menggandakan anggaran pertahanan sejak 10 tahun belakangan, meningkatkan instalasi pertahanan di laut Natuna, dan alokasi anggaran pertahanan untuk membeli kapal frigat/perusak dan kapal selam.
4.	Vietnam	Menggandakan anggaran pertahanan sepanjang tahun 2005-2010, dan menggandakan kembali anggaran pertahanan pada 2015. Melakukan akuisisi kapal perang yang termasuk diantaranya 6 kapal selam kelas <i>Killo</i> dan 4 kapal <i>Frigates kelas Gepard</i> dari Rusia.
5.	Filipina	Filipina melakukan pembelian kapal penjaga pesisir dari Amerika Serikat, kapal tempur dari Korea Selatan, kapal frigat dan SSV
6.	Myanmar	Menerbitkan Buku Putih Pertahanan pada tahun 2016 yang membahas keamanan nasional terkait isu perbatasan
7.	India	Menandatangani kesepakatan multi-triliun dolar dengan Amerika Serikat terkait pengadaan helikopter tempur, Kapal terbang angkut kelas berat.
8.	Australia	Pada tahun 2014 Australia mengeluarkan anggaran 12 triliun dolar untuk membeli 48 pesawat tempur, 41 triliun dolar untuk pembelian kapal selam dari Prancis

Sumber: M. Smith, 2018

Indonesia memiliki respon terhadap isu sengketa di Laut China Selatan, tetapi Indonesia terlihat masih berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas-aktif dengan tidak menunjukkan keberpihakannya. Laksmana dalam Smith (M. Smith, 2018, p. 79) mengatakan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia diarahkan pada *confidence building measure/CBM*, pengembangan kapabilitas (pertahanan), pengembangan industri pertahanan, daripada turut serta pada koalisi kerjasama militer anti-China.

Belanda memiliki hubungan baik dengan Indonesia dengan melihat sepak terjang hubungan bilateral kedua negara, Indonesia yang memiliki niat untuk mengembangkan hubungan kerjasama disambut baik oleh Belanda dengan munculnya kesepakatan *Joint Declaration Letter* antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia yang di dalam butir-

butir pokok kerjasama terdapat kerjasama di bidang politik dan keamanan yang mencakup pada hal-hal yang berkaitan pada kerjasama pertahanan, mendukung nilai-nilai hukum internasional dan nilai kemanusiaan (Kemlu RI, 2013, p. 3). Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Belanda berlanjut dengan disepakatinya Nota Kesepahaman Kerjasama Pertahanan sejak tahun 2014-2019 yang meliputi enam bidang yaitu, 1) dialog strategis keamanan regional dan internasional, 2) pertukaran kunjungan pejabat pertahanan kedua negara, 3) kerjasama materiil pertahanan meliputi kerjasama produksi, pemeliharaan dan dukungan logistik, pertukaran dan alih teknologi dan informasi, pelatihan teknis personil dan kerjasama industri pertahanan, 4) pertukaran informasi dan pengalaman hukum dan sejarah militer, penganggulangan bencana, IPTEK, intelijen militer dan keamanan maritim, 5) meningkatkan hubungan antar angkatan bersenjata kedua negara di bidang pendidikan dan pelatihan, kunjungan kapal, logistik dan operasi pemeliharaan perdamaian, 6) kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan (Kemhan RI, 2014, p. 1).

Dari data yang ada sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu di kembangkan pada postur pertahanan Indonesia, ditambah dengan adanya dinamika di kawasan semakin memaksa Indonesia untuk lebih menaruh perhatian nya pada bidang keamanan. Sebelumnya hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dan Belanda yaitu, kerjasama pengadaan alutsista, dan selanjutnya cakupan bidang kerjasama menjadi lebih luas tidak hanya pada proyek pengadaan alutsista namun juga pada pengembangan sektor dan kapabilitas pertahanan mulai dari pertukaran informasi, pelatihan dan pendidikan militer, logistik, hingga pada pemeliharaan perdamaian, yang dijabarkan pada nota kesepahaman yang telah disepakati, selanjutnya nota kesepahaman di bidang pertahanan ini di perpanjang untuk lima tahun kedepan, mengingat perkembangan alutsista masih belum mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak tahun 2014-2019 dengan melihat pada

pencapaian MEF tahap II yang masih belum memenuhi target 75% seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penulis juga mengutip dari halaman *website* Global Fire Power yang mencantumkan bahwa Indonesia memiliki indeks kekuatan militer yang berada pada posisi ke-16 dunia, yang jauh berada diatas Belanda yang berada di posisi ke-36 (Global Fire Power, 2020, p. 1). Uraian-uraian diatas pun semakin menimbulkan rasa keingintahuan apakah diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia khususnya pada hubungan kerjasama dengan Belanda dilaksanakan cukup efektif atau belum cukup efektif.

Hal tersebut kemudian menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai efektivitas diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia mengingat kerjasama ini tetap berlangsung/diperpanjang sehingga dirasa perlu untuk mengetahui ke-efektivitasnya dalam mencapai kepentingan pertahanan nasional Indonesia. Berdasarkan beberapa pertimbangan maka penulis ingin mengajukan sebuah penelitian berjudul **“Efektivitas Diplomasi Indonesia Studi: Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda dalam Mencapai Kepentingan Nasional Pertahanan Indonesia”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena dan gejala yang terdapat yang terdapat di bagian latar belakang di atas, maka selanjutnya dirumuskanlah rumusan masalah penelitian yaitu, **“Bagaimana efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia dengan Belanda dalam mencapai kepentingan pertahanan nasional Indonesia?”**

1.3. BATASAN MASALAH

Penulis dalam penelitian ini membatasi permasalahan penelitian pada Nota Kesepahaman yang disetujui oleh Indonesia dan Belanda dalam kerjasama pertahanan, sehingga diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda merujuk pada batasan atau ruang lingkup kerjasama pertahanan yang tercantum pada Nota Kesepahaman Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Belanda 2014-2019.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan informasi mengenai kerjasama pertahanan melalui nota kesepahaman antara Indonesia dan Belanda yang disepakati, serta melakukan analisis untuk mengetahui efektivitas diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional pertahanan Indonesia.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Pada penelitian ini terdapat 2 macam manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi akademisi dan para peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan memberikan inspirasi dalam penelitian terkait pada kajian diplomasi bidang kerjasama pertahanan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk lembaga atau instansi terkait, sebagai sarana untuk menambah informasi atau menjadi pertimbangan dalam menentukan arah atau kebijakan di masa depan terkait, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Belanda

1.6. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian sub-bab ini penulis menjadikan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, sebagai pedoman mengenai kepentingan nasional Indonesia khususnya di bidang kerjasama pertahanan internasional. Pada proses menelaah topik dan pembahasan permasalahan yang sebelumnya telah dibahas di atas, penulis akan menjelaskan mengenai teori efektivitas dan mengaitkan konsep dari **kepentingan nasional** dan melakukan analisis lebih mendalam tentang **efektivitas diplomasi pertahanan** Indonesia dengan Belanda dalam mencapai kepentingan nasional pertahanan Indonesia.

Penulis juga merangkum beberapa literatur atau penelitian sebelumnya, yang berkaitan pada hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara lain, yang akan dirangkum pada tabel berikut ini

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Yoshua Parulian, Hari Utomo, Yusnaldi
	Judul	Analisis Confidence Building Measure (CBMs) Terhadap Kerjasama Bilateral Pertahanan Antara Indonesia Dengan Singapura
	Nama Jurnal	Jurnal Keamanan Maritim Volume 4 no 3 tahun hal: 88-109
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Menjelaskan peranan DCA (Defence Cooperation Agreement) sebagai bentuk kerjasama pertahanan yang didasari pada konsep Confidence Building Measure (CBMs) antara Indonesia dan Singapura
	Perbandingan	Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui efektivitas dari Diplomasi Pertahanan Indonesia yang merupakan bagian dari kerjasama perintahan Indonesia-Belanda dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia. Perbandingan terdapat pada objek atau konsep kerjasama, yaitu penulis ingin melihat keberhasilan kegiatan diplomasi pertahanan merujuk konsep Cottey dan Forster, sedangkan Pada penelitian sebelumnya melihat bentuk kerjasama yang menghasilkan DCA yang mengacu pada konsep

		CBMs, yang merupakan usaha kerjasama pertahanan pada hubungan Indonesia-Singapura.
2	Nama Penulis	Syaiful Anwar, Lasmono, Firda Nuzulia
	Judul	Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Meningkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat (2012-2017)
	Nama Jurnal	Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 4 no 1 hal: 21-44
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Menjelaskan mengenai upaya meningkatkan kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia, melalui konsep Confidence Building Measure (CBMs) dan Capacity Building dimana penelitian tersebut menemukan bahwa pada konsep CBM sudah berjalan cukup baik dengan terpenuhinya 4 dari 7 indikator yang terpenuhi, dan pada capacity building masih terdapat kendala yaitu tidak tercapainya proses transfer teknologi dari AS bagi Indonesia.
3	Perbandingan	Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui efektivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia yang merupakan bagian dari usaha kerjasama pertahanan Indonesia-Belanda dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia. Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yaitu peningkatan hubungan kerjasama pertahanan yang berkaitan pada hubungan perekonomian kedua negara melalui konsep Confidence Building Measure (CBMs) dan Capacity Building yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan.
	Nama Penulis	Jana Milia, Yandry Kurniawan, Wibisono Poespitohadi
	Judul	Analysis of Defence Cooperation Agreement Between Indonesia And Singapore in 2007-2017 Through Defense Diplomacy Goal Variabel
	Nama Jurnal	Jurnal Pertahanan Vol.4 No.2 pp.104-119
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Menjelaskan faktor dan variabel yang menyebabkan kegagalan diplomasi pertahanan Singapura, Indonesia merasa kedaulatan atas wilayahnya merasa terancam dengan rancangan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura, sehingga DPR menolak untuk melanjutkan kerjasama dan memaksa Singapura untuk merevisi poin-poin kerjasama
	Perbandingan	Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui efektivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia yang merupakan bagian dari kerjasama pertahanan Indonesia-Belanda dalam mencapai kepentingan

		nasional Indonesia. Perbandingan penelitian terdapat pada tujuan penelitian. Pada penelitian sebelumnya ialah ingin mengetahui penyebab kegagalan diplomasi pertahanan Singapura dalam usaha untuk meratifikasi Defense Cooperation Agreements (DCA) yang disebabkan oleh penolakan oleh DPR karena kebijakan tersebut mengancam kedaulatan wilayah Republik Indonesia.
4	Nama Penulis	Marina Ika Sari, Leonard F Hutabarat, Amarulla Octavian
	Judul	Indonesia-India Defense Diplomacy in The Indian Ocean
	Judul Jurnal	Jurnal Pertahanan Vol.4 No.2 pp: 77-88
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Menjelaskan peran diplomasi pertahanan antara Indonesia dan India di Kawasan Samudera Hindia. Melalui forum komunikasi pertahanan antara kedua negara di wilayah Samudera yang menjadi wilayah strategis keamanan kedua negara dengan tujuan untuk menjaga kestabilan keamanan di wilayah tersebut. Indonesia diharapkan terus melanjutkan kerjasama untuk mendorong kualitas diplomasi pertahanan yang semakin baik.
	Perbandingan	Pada penelitian ini penulis ingin melihat efektivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia yang merupakan bagian dari kerjasama perbatasan Indonesia-Belanda dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia. Perbandingan terdapat pada objek yang diteliti dan tujuan. Pada penelitian sebelumnya dibahas mengenai kerjasama pertahanan antara India dan Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kestabilan kawasan yaitu pada Samudera Hindia.
5	Nama Penulis	Luerdi dan Hizra Marisa
	Judul	Partisipasi Sipil dalam Inovasi Militer: Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Turki 2010-2018
	Judul Jurnal	Global Strategis Vol 13, No.2 hal: 17-34
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	Menjelaskan faktor yang mendorong kebijakan kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Turki dalam kerjasama pertahanan. Indonesia mengejar agenda kemandirian

		teknologi sehingga melakukan kerjasama dengan negara yang berada diluar mitra tradisional-nya.
	Perbandingan	Pada penelitian ini penulis ingin melihat efektivitas Diplomasi Indonesia yang merupakan bagian dari kerjasama pertahanan Indonesia-Belanda dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia. Perbandingan terdapat pada konsep pembahasan kerjasama pertahanan. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai kerjasama pertahanan melalui kerjasama pertahanan

1.6.1. KEPENTINGAN NASIONAL PERTAHANAN PADA BIDANG PEMBANGUNAN KERJASAMA INTERNASIONAL INDONESIA

Bidang pembangunan kerjasama internasional merupakan bagian dari kepentingan nasional pertahanan negara Indonesia, merujuk pada Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015 menjelaskan bahwa pembangunan kerjasama internasional diarahkan pada peningkatan kerjasama pertahanan secara bilateral maupun multilateral mengacu pada kebijakan politik luar negeri bebas-aktif, sekaligus memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bentuk kerjasama internasional yang dimaksud ialah kerjasama yang membangun kepercayaan (*Confidence Building Measure/CBM*), pembangunan kapasitas (*capacity building*), ikut serta mewujudkan perdamaian dunia, Pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis sesuai kebijakan pemerintah (Kemhan RI, 2015, p. 42).

Kepentingan nasional menurut Burchil biasa digunakan secara terpisah, kendati demikian berkaitan satu sama lain. Kepentingan nasional digunakan dalam dua cara, pertama untuk menjelaskan dan menentang kebijakan luar negeri, kedua sebagai alat untuk menganalisis dan menjelaskan tentang tingkah laku negara dalam urusan-urusan luar negeri. Kepentingan nasional digunakan untuk membentuk tindakan politik dalam tujuan untuk

mempertahankan, menentang dan mengajukan kebijakan. Komposisi yang membentuk sebuah kepentingan nasional terdiri dari beberapa hal (Burchill, 2005, pp. 23–28):

- 1) Negara melindungi kedaulatan dan integritas wilayah dari serangan eksternal.
- 2) Aset nasional strategis (jalur pelayaran, pelabuhan, dll) dan ekonomis (sumber daya)
- 3) Pemerintah sebagai agen yang melakukan artikulasi dan interpretasi kepentingan nasional

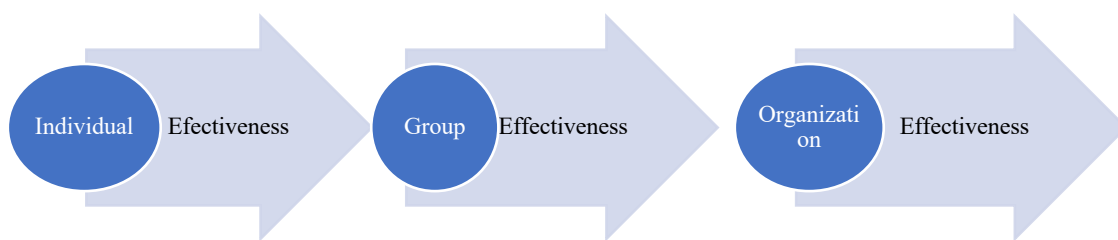
Peran manusia sebagai agen politik kemudian dikaitkan terhadap konsep kepentingan dan kekuasaan, dimana Morgenthau berpendapat seluruh manifestasi politik dan bentuk persekutuan empiris (seperti institusi politik, sistem representasi, pemilihan keputusan, diplomasi, dan negosiasi, perang dan perdamaian, organisasi internasional, sistem internasional daripada negara, dan lain-lain), yang terlihat sebagai lambang dan ciptaan dari *human agency*, dapat dengan baik menjadi terlihat, diketahui, dan dipelajari melalui aplikasi penemuan dari konsep kekuasaan, kepentingan, moralitas dan keterkaitannya antara satu sama lain (H. J. Morgenthau, 2012, p. 39). Faktanya setiap negara harus mengejar kepentingan nasional mereka sendiri, berarti negara lain dan pemerintahan tidak dapat mempercayai atau sepenuhnya dipercayai. Seluruh kesepakatan internasional merupakan ketetapan dan bersyarat pada kesediaan negara untuk memperhatikan setiap ketetapan. Itu membuat perjanjian dan seluruh kesepakatan lain, konvensi, aturan adat, peraturan, hukum, dan begitu seterusnya antara negara semata-mata merupakan susunan yang diatur secara bijaksana yang dapat dan akan dikesampingkan, apabila terjadi konflik terhadap kepentingan vital pada negara (Robert Jackson, 2013, p. 67). Kaitan erat antara kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri dijelaskan oleh Frankel bahwa apabila kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai formulasi dari hasil yang diinginkan (diekspektasikan) dan konsekuensi terhadap keputusan yang di adopsi (dibuat) oleh siapa yang memiliki otoritas (kemampuan) untuk mengerjakan perlengkapan dari negara dan merupakan suatu pecahan yang signifikan

dari sumber daya negara sampai pada itu, maka kepentingan nasional menjelaskan hasil yang diinginkan oleh negara (Joseph Frankel, 1970, p. 18).

1.6.2. EFEKTIVITAS

Efektivitas berasal dari kata “efektif”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu ber-akibat, berpengaruh, berhasil guna. Efektivitas menurut Robbins merupakan derajat yang menunjukkan bahwa organisasi mencapai atau bertemu dengan kebutuhan daripada klien (Robbins & Judge, 2013, p. 63). Pendekatan pencapaian tujuan menurut Robbins menyatakan bahwa efektifitas organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian dari tujuan daripada caranya, kriteria pencapaian tujuan ini ialah maksimalisasi laba, memaksa musuh untuk menyerah, memenangkan pertandingan basket, membuat pasien menjadi sembuh, dan lain sebagainya (Robbins, 1994, p. 58).

Gibson menjelaskan pengertian tentang efektivitas yaitu, “*goal approach to effectiveness*” yang memiliki pengertian bahwa perspektif atas efektivitas menekankan peran utama dari pencapaian sasaran sebagai kriteria yang menilai/menaksir sebuah efektivitas (Gibson et al., 2012, p. 20). Efektivitas memiliki beberapa persepektif menurut Gibson yaitu, efektivitas individu, efektivitas grup, dan efektivitas organisasi (Gibson et al., 2012, p. 15)



Sumber: Gibson, 2012 p.8

A. Efektivitas Individu

Dicapai melalui aspek pemenuhan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, motivasi, tekanan. Keberhasilan Individu memiliki kaitan erat dengan

Kelompok/grup karena individu bekerja di dalam sebuah kelompok atau organisasi

B. Efektivitas Kelompok

Pada efektivitas Kelompok lebih di fokuskan pada keterpaduan, kepemimpinan, struktur/kerangka, peran, Norma. Kelompok merupakan kontribusi peran dari individu atau anggota

C. Efektivitas Organisasi

Organisasi menekankan pada aspek lingkungan, teknologi, pilihan startegis, struktur, proses, budaya. Organisasi merupakan gabungan hasil yang berasal dari kelompok dan individu yang menghasilkan produk atau prestasi yang lebih besar daripada bagian-bagian kelompok dalam organisasi.

Efektivitas menurut Mahmudi adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas merupakan suatu hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar output kontribusi dari output maka semakin efektif sebuah organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2015, p. 86)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Hasil daripada rumus efektifitas diatas kemudian diberikan penilaian, dengan mengikuti kriteria nilai efektifitas sebagai berikut:

Nilai Kerja Efektivitas menurut Mahmudi (Mahmudi, 2015, p. 111)

Tabel 1. 4 Tingkat Efektifitas

Pemenuhan	Nilai
100%	Efektif
85%-99%	Cukup Efektif
65%-84%	Kurang Efektif
<65%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2015, p. 111

Pembahasan diatas memberikan pemahaman bahwa efektivitas merupakan pencapaian yang diperoleh suatu individu, kelompok atau organisasi sesuai pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada topik penelitian ini peneliti memberikan batasan bahwa hubungan Kerjasama pertahanan Indonesia dan Bealanda termasuk efektifitas organisasi karena dianggap cukup sesuai. Penulis membatasi pengertian atau penentuan efektivitas diplomasi pertahanan merujuk pada sasaran dan tujuan dari diplomasi pertahanan menurut konsep diplomasi pertahanan Andrew Cottey dan Anthony Forster.

Setelah memahami hubungan pengertian efektivitas, selanjutnya penulis inign menjelaskan pengertian diplomasi dan kepentingan nasional yang merupakan bagian dari *soft power*.

1.6.3. DIPLOMASI

Diplomasi dikenal sebagai tindakan representatif sebagai aktivitas untuk melakukan kontak secara damai (G.R. Berridge, 2001, p. vii). Diplomasi di abad ke-19, akrab dengan esensi terhadap hal *high-polities*, keamanan, dan memastikan kepentingan nasional, di susun secara formal, dan kerap kali secara privat, oleh *aristocrat* dan *haut-bourgeois* (didas kelas menengah dalam kelompok sosial) secara relatif tidak dapat di sentuh oleh keinginan umum. Kedutaan besar memiliki otoritas yang besar. Namun pada abad ke-20 diplomasi lebih bersifat terbuka, dalam persoalan terhadap undang-undang, dalam pandangan media, dan dibungkus dalam propaganda dan ideologi, populis, sosialis, dan politikus fasis mempraktikan diplomasi, kedutaan besar kehilangan pengaruhnya, di ambil alih oleh perkembangan komunikasi. Dan kemudian isu *low-politics* dari ekonomi memperluas agendanya, dan isu baru seperti lingkungan, migrasi, dan kemanusiaan mendapatkan posisinya (Michael Graham Fry, Erik Goldstein, 2002, pp. viii–ix). Esensi diplomasi juga tidak berubah, seperti biasanya diplomasi akan lakukan ialah, mempromosikan dan menjelaskan kepentingan negara/nasional (G.R. Berridge, 2001, p. vii).

Diplomasi menurut Barston merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan manajemen pada suatu hubungan antar negara dan aktor lainnya. Pada sudut pandang sebuah negara, diplomasi berkaitan dengan nasihat, membentuk dan mengimplementasikan sebuah kebijakan luar negeri. Seperti tindakan formal suatu negara maupun perwakilan dan juga aktor-aktor lain, artikulasi, koordinasi dan menjaga kepentingan yang khusus maupun luas, melalui tindakan surat-menyurat, pembicaraan rahasia, pertukaran pandangan, melakukan lobi, kunjungan kenegaraan, ancaman dan aktivitas yang terkait (Barston, 2014, p. 1).

Diplomasi menurut Morgenthau dalam bukunya *Politic Among Nations* merupakan karya seni yang menghantarkan elemen-elemen dari *national power* yang berbeda untuk mencapai efek yang maksimal dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional (H. Morgenthau, 1997, p. 159).

Merujuk pada Konvensi Vienna tahun 1961 Artikel 3, menjelaskan bahwa fungsi diplomasi ialah (Nations, 1961, p. 3):

- a) ***Representing*** the sending State in the receiving state
- b) ***Protecting*** in the receiving State the interest of the sending state and of its nationals, within the limits permitted by international law;
- c) ***Negotiating*** with the Government of the receiving State
- d) ***Ascertaining*** by all lawful means conditions and development in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;
- e) ***Promoting*** friendly relations between the sending State and receiving State, and developing their cultural and scientific relations.

Soft power merupakan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan lebih mengedepankan daya tarik daripada menggunakan tindakan koersif atau melakukan pembayaran/biaya (Joseph S. Nye, 2005, p. 12). *Soft power* yang di jelaskan oleh Nye memiliki keterkaitan dengan konsep kepentingan nasional daripada suatu negara dimana ia mengatakan *soft power* digunakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan (negara), melalui daya tarik daripada menggunakan tindakan koersif atau mengeluarkan biaya.

Sumber dari *soft power* kemudian dijelaskan oleh Nye dimana terdapat tiga sumber yang secara primer menghasilkan *soft power* (Joseph S. Nye, 2005, pp. 34–40):

- 1) *Culture*: kebudayaan, edukasi, literasi, dan seni. Dikatakan apabila kebudayaan mempromosikan nilai dan kepentingan yang juga di bagikan oleh yang lain, akan meningkatkan kemungkinan untuk tercapainya hasil yang diinginkan.
- 2) *Political Value*: nilai politis baik di dalam negara maupun terhadap urusan luar negeri, biasanya berkaitan pada isu kemanusiaan. Nye mengambil contoh ketika, terjadi kasus pengucilan ras di Amerika Serikat, menyebabkan Amerika Serikat kehilangan *soft power* mereka. Kemudian Amerika Serikat memiliki kebijakan mengenai hak asasi manusia, yang menambah *soft power* Amerika Serikat. Dengan kata lain nilai politik merupakan karakteristik politis nilai yang di pegang teguh oleh negara.
- 3) *Foreign Policy*: kebijakan luar negeri cenderung berkaitan dengan pemerintahan, dan terhadap sikapnya pada beberapa konteks. Berkaitan aturan yang menjadi acuan dalam melakukan hubungan luar negeri dan responya terhadap urusan luar negeri. Nye memberikan contoh, pemerintah dalam mengelola nilai politik dan kebijakan luar negeri, pemerintah yang di dalam ruang lingkup domestik bersistem demokrasi, dan pada ruang lingkung institusi internasional bersikap kooperatif/kerjasama dengan negara lain, dan dalam kebijakan luar negerinya mempromosikan perdamaian dan hak asasi manusia.

Nye Juga menjelaskan bahwa teradapat tiga kekuatan atau power yang terdapat pada era globalisasi dan revolusi informasi. Kekuatan saat ini tidak begitu nyata (*tangible*) dan tidak terlalu bersifat koersif, terlebih pada negara yang mengedepankan demokrasi. Nye kemudian membagikan kekuatan atau *power* ke dalam tiga bagian dan berikut penjelasannya (Joseph S. Nye, 2005, pp. 62–63).

Tabel 1. 5 Tiga Bentuk Power/Kekuatan Menurut Nye

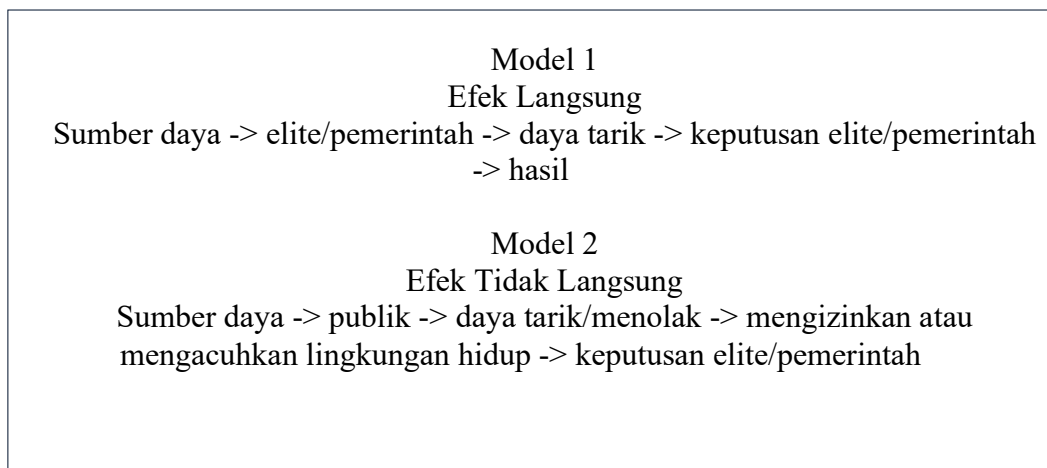
	<i>Behavior</i>	<i>Primary Currencies</i>	<i>Government Policies</i>
<i>Military Power</i>	<i>Coercion, Deterrence, Protection</i>	<i>Threats and force</i>	<i>Coercive diplomacy, war, alliance.</i>
<i>Economic Power</i>	<i>Inducement, coercion</i>	<i>Payment, sanction.</i>	<i>Aid, bribes, sanction.</i>

<i>Soft Power</i>	<i>Attraction, agenda setting</i>	<i>Value, culture, policies, institutions</i>	<i>Public diplomacy, bilateral and multilateral diplomacy</i>
-------------------	-----------------------------------	---	--

Sumber: Joseph S. Nye, 2005, pp.62-63

Soft power merupakan suatu bentuk kekuatan atau kemampuan yang memiliki kontribusi dalam usaha untuk mencapai salah satu kepentingan (nasional), sama seperti apa yang dapat dilakukan oleh *hard power*, konsep yang tidak meragukan pendapat yang di kemukakan oleh kaum realis (Ohnesorge, 2020, p. 60). Nye dalam bukunya *The Future of Power* (Joseph S. Nye, 2011, pp. 94–95) menjelaskan bahwa *Soft power* kemudian memiliki dua macam model dalam mempengaruhi targetnya, sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Model soft power dalam mempengaruhi target



Sumber: Joseph S. Nye, 2011, pp. 94-95

Dapat dipahami bahwa *soft power* memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah hasil yang di motori oleh keinginan untuk mencapai kepentingan nasional dari sebuah negara dan dilakukan melalui kerjasama dalam bentuk bilateral maupun multilateral. *Soft power* inilah yang kemudian memperkuat pemahaman mengenai diplomasi sebagai cara untuk melakukan interaksi dengan negara lain dalam mencapai suatu tujuan yang didasari pada keinginan suatu negara demi mencapai kepentingan nasionalnya.

1.6.4. DIPLOMASI PERTAHANAN

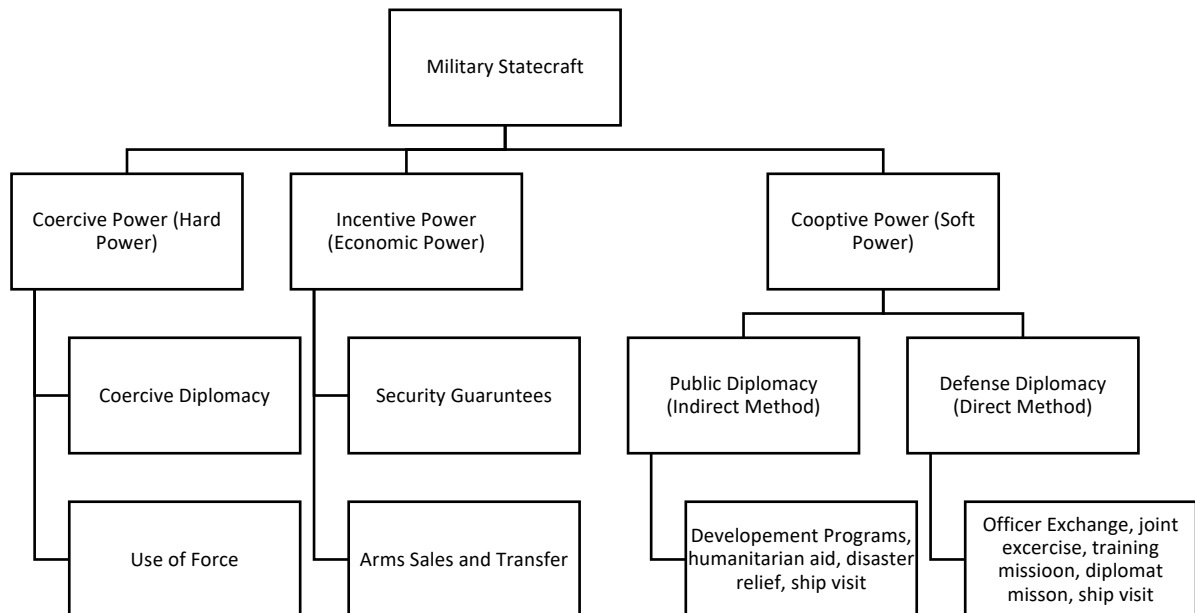
Diplomasi bidang kerjasama pertahanan menurut Winger (Winger, 2014, p. 1) adalah sebuah cara damai institusi pertahanan dari suatu negara untuk melakukan kerjasama dengan institusi pemerintahan dari negara lain dalam maksud dan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, diplomasi pertahanan juga merupakan konsep *soft power* yang merujuk pada konsep Nye dalam menjelaskan cara dari *soft power* dalam mempengaruhi targetnya. Diplomasi pertahanan menggunakan aplikasi secara langsung dari *soft power*, sebagai berikut:

Model langsung:

Sumber daya > pemerintah > keputusan elite/pemerintah

Diplomasi secara tradisional seperti kunjungan kenegaraan, konferensi internasional merupakan tindakan “langsung” dari *soft power*, dikarenakan ia merupakan hubungan antara pemerintah dengan pemerintah dalam mencapai hasil yang diinginkan. Winger juga selanjutnya mengaitkan diplomasi pertahanan melalui perspektif *statecraft*, dengan melihat kerjasama antara Inggris dan China, yang merupakan aplikasi langsung dari *soft power*. Metode langsung dari diplomasi pertahanan dijelaskan oleh Winger sebagai berikut (Winger, 2014, p. 1):

Gambar 1. 2 Diplomasi Pertahanan sebagai tindakan Soft Power



Sumber: Winger, 2014

Selain penjelasan mengenai Winger terdapat juga pengertian diplomasi yang memiliki hubungan terkait dengan diplomasi pada bidang pertahanan.

Diplomasi pertahanan menurut Hartono mengatakan bahwa diplomasi pertahanan tradisional memiliki pengertian sebagai kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara dalam upaya untuk mencari teman atau aliansi. Perkembangan diplomasi pertahanan pasca-tradisional kemudian memiliki tujuan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain untuk mengurangi ketidakpastian di lingkungan internasional, dan terdapat penambahan varian di dalam diplomasi pertahanan meliputi *confidence building measure* (CBM), kapabilitas pertahanan, dan industri pertahana (Hartono, 2011, p. 9).

Diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan yang lama menekankan pada tujuan untuk pembalasan terhadap musuh, dan diplomasi pertahanan yang baru lebih menekankan pada kerjasama terhadap negara yang

memiliki potensi sebagai musuh, mendorong demokrasi, pemerintahan yang baik dan kemanusiaan dan memungkinkan negara untuk dapat berhadapan dengan masalah keamanan-nya (Andrew Cottey, 2004, p. 8).

Diplomasi pertahanan mengalami perubahan seiring berkembangnya jaman, seperti dijelaskan sebelumnya dapat dipahami bahwa diplomasi pertahanan telah berkembang ke arah yang lebih kompleks dan variatif yang meliputi hal *confidence building measure/CBM*, kapabilitas pertahanan, industri pertahanan, mendorong nilai demokrasi, perdamaian dan isu kemanusiaan.

1.6.5. KONSEP-KONSEP MENGENAI DIPLOMASI PERTAHANAN

Konsep-konsep mengenai diplomasi kerjasama pertahanan adalah sebagai berikut:

1.6.5.1. Konsep Diplomasi Pertahanan Idil Syawfi

Seperti yang disebutkan oleh Multazam (Multazam, 2010, p. 18) mengutip dari Idil Syawfi (Syawfi, 2009, p. 19), menjelaskan bahwa keberhasilan diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan, dan pembangunan. Namun secara parsial terdapat tiga karakter utama dari diplomasi pertahanan, yaitu:

- 1) Diplomasi Pertahanan untuk *confidence building measure*, yang terdiri dari (Multazam, 2010, p. 19):
 - a) Kunjungan kenegaraan
 - b) Dialog dan konsultasi
 - c) Saling tukar informasi strategis
 - d) Pembatasan kapabilitas pertahanan
 - e) Deklarasi kerjasama strategis
 - f) Pertukaran perwira
 - g) Pendidikan militer
 - h) Kesepakatan hubungan baik
 - i) Latihan militer bersama
- 2) Diplomasi pertahanan untuk kapabilitas pertahanan, yang terdiri dari (Multazam, 2010, p. 20):

- a) Usaha-usaha kerjasama strategis menyangkut dalam hal bantuan militer
 - b) Pembelian alutsista dan kredit ekspor
 - c) Pembangunan yang dimaksud seperti pangkalan militer
 - d) Pemberian asistensi atau *security umbrella*, dari negara *core* terhadap negara *periphery* maupun sebaliknya
- 3) Diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan, yang dilakukan melalui cara sebagai berikut (Multazam, 2010, p. 20):
- a) Kerjasama strategis antara kedua negara dalam hal yang bersangkutan dengan produksi senjata
 - b) Kerjasama strategis antar negara, berkaitan pada pengembangan dan penelitian persenjataan
 - c) Pemberian lisensi
 - d) Investasi di bidang industri pertahanan
 - e) Aktivitas transfer teknologi

Pada konsep yang dijelaskan oleh Syawfi, terdapat tiga pokok utama dalam aktivitas diplomasi pertahanan, yaitu untuk meningkatkan *confidence building measures*/CBM, kapabilitas pertahanan, dan industri pertahanan. Ketiga hal tersebut dicapai melalui hubungan kerjasama antar negara baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral.

1.6.5.2. Konsep Diplomasi Pertahanan menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster

Cottey dan Forster dalam bukunya *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles Of Military Cooperation And Assistance*, mengemukakan pendapat mengenai pandangan terhadap diplomasi pertahanan, bahwa diplomasi pertahanan telah mengalami perubahan, dimana diplomasi pertahanan saat ini tidak hanya berkedudukan pada peran politik yang seutuhnya dalam mendukung pasukan bersenjata dan keamanan aliansi, tetapi juga sebagai maksud untuk mengejar tujuan dan sasaran dari kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri yang lebih luas.

Diplomasi pertahanan mencakup begitu banyak aktivitas atau kegiatan yang sebelumnya disebut sebagai kerjasama militer atau asistensi militer, yang dijelaskan oleh Cottey dan Forster pada tabel berikut (Andrew Cottey, 2004, pp. 6–7):

Tabel 1. 6 Aktifitas Diplomasi Pertahanan

No	Aktifitas Diplomasi Pertahanan
1.	Kontak bilateral dan multilateral antara senior militer dan petugas pertahanan sipil
2.	Perjanjian dari atase pertahanan ke negara asing
3.	Pelatihan militer negara asing dan personel pertahanan sipil
4.	Persediaan ahli dan saran pada pengendalian secara demokratis terhadap pasukan bersenjata, manajemen pertahanan dan area teknis militer
5.	Kontak dan pertukaran antara personel dan unit militer dan kunjungan kapal
6.	Penempatan personel militer dan sipil pada kementerian pertahanan negara mitra atau pasukan bersenjata
7.	Penyebaran/penempatan tim pelatihan
8.	Penyediaan perlengkapan militer dan bantuan materiil
9.	Pelatihan bilateral dan multilateral untuk tujuan latihan
10.	Perjanjian kerjasama bilateral pertahanan

Sumber: A. Cottey & Forster, 2004, pp.6-7

Dalam sejarah kerjasama dan asistensi militer secara luas merupakan bagian dari politik internasional, politik *balance-of-power* dan pengejaran kepentingan nasional dalam arti sempit. Negara melakukan perjanjian kerjasama pertahanan, dan menyediakan asistensi militer pada negara lain dengan maksud untuk mengimbangi atau menghalangi musuh, mengatasi pengaruh dari lingkungan, mendukung rezim yang bersahabat dalam menekan lawan politik domestik atau mempromosikan kepentingan perdagangan seperti, perdagangan persenjataan atau hubungan perdagangan yang lebih umum (Andrew Cottey, 2004, p. 7).

Diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster kemudian terbagi menjadi tiga bagian yang merupakan butir-butir yang menjelaskan mengenai tujuan/goals dari diplomasi pertahanan itu sendiri, yaitu sebagai berikut (Andrew Cottey, 2004, p. 7):

- 1) *Strategic Engagement*
- 2) *Promoting Democratic Civil-Military Relations*
- 3) *Enhancing Peacekeeping Capabilities*

Strategic Engagement merupakan usaha untuk mencegah terjadinya konflik, melalui kerjasama dan asistensi militer, yang sejak tahun 1990 peningkatan hubungan kerjasama dan asistensi militer mengalami peningkatan, tetapi bukan merujuk pada peran tradisional sebatas untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan aliansi, tapi lebih merujuk pada untuk menciptakan hubungan kerjasama dengan lawan politik atau yang memiliki kemungkinan untuk menjadi lawan politik dan bertujuan mencegah terjadinya konflik. Diplomasi pertahanan dapat berkontribusi pada pencegahan konflik melalui beberapa cara, yaitu (Andrew Cottey, 2004, pp. 15–17):

- 1) Memberikan tanda dan komitmen untuk mengembangkan hubungan kerjasama
- 2) Mempromosikan transparansi militer dan mengurangi kesalahpahaman
- 3) Mengenalkan dan persamaan persepsi untuk kepentingan bersama
- 4) Mengubah pola pikir rekan kerjasama militer
- 5) Mensosialisasikan kerjasama militer
- 6) Asistensi pertahanan

Democratic civil-military relations memiliki cakupan politis dan dukungan materil pembaharuan dan nilai demokrasi, dorongan untuk mencegah kembalinya terhadap sikap otoriter, dan teknis praktis dan asistensi militer terhadap pengembangan institusi dan norma yang demokratis. Diplomasi pertahanan dapat membantu dalam mengenalkan *democratic civil military relations* di beberapa jumlah area spesifik, yaitu (Andrew Cottey, 2004, pp. 33–34):

- 1) Pengendalian politisi sipil terhadap militer (dewan keamanan nasional, kementerian pertahanan, atau semacamnya)

- 2) Pengendalian demokratis sipil terhadap kebijakan pertahanan (kementerian pertahanan)
- 3) *Legislative/parliamentary oversight* (melibatkan peranan legislative dan parlementer dalam mengawasi kebijakan pertahanan, untuk mengurangi peluang terjadinya kelalaian dalam pembuatan kebijakan)
- 4) Peraturan hukum, kemanusiaan dan keadilan: memastikan ketundukan kebijakan pertahanan terhadap peraturan yang menyangkut hukum, menghormati perihal kemanusiaan dan keadilan.
- 5) Keterkaitan Lembaga sipil: melibatkan transparansi militer dan kebebasan dalam informasi militer, anggaran pertahanan dan pasukan bersenjata terhadap, lembaga penelitian, advokasi *think-tank*, kelompok kampanye, dan independensi media yang memiliki keahlian di bidang pertahanan.

Peace-keeping capabilities usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam menjaga perdamaian, pada tahun 1990 penggunaan militer tidak hanya secara langsung mengenai usaha untuk melawan musuh eksternal maupun internal, tetapi lebih kepada masalah perdamaian yang lebih umum, yang memiliki tujuan meningkatkan *confidence building* dan menduduki posisi yang memiliki tujuan untuk mempromosikan nilai demokrasi, *good governance* dan isu kemanusiaan.

1.7. KONSEP DIPLOMASI PERTAHANAN YANG DIGUNAKAN PADA PENELITIAN INI

Dalam menjelaskan keberhasilan diplomasi pertahanan Indonesia dengan Belanda dalam mencapai kepentingan pertahanan nasional Indonesia, peneliti menggunakan konsep Diplomasi Pertahanan menurut Cottey dan Forster. Untuk itu penulis akan menjelaskan keterkaitan konsep yang digunakan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan dan

menunjukkan bahwa konsep diplomasi pertahanan tersebut relevan untuk melakukan analisis terhadap topik penelitian.

Konsep diplomasi pertahanan yang dipaparkan oleh Cottey dan Forster memiliki indikator-indikator yang cukup jelas, seperti Kerjasama Strategis (*Strategic Engagement*) dalam mencapai rasa saling percaya atau *confidence building*, promosi nilai demokrasi (*promoting democratic civil-military relations*) dalam upaya kerjasama pengembangan bidang pertahanan dan juga usaha dalam menjaga perdamaian (*peacekeeping capabilities*) ketiga indikator tersebut memiliki pokok pemikiran yang relevan dengan Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pembangunan di bidang kerjasama internasional dilakukan dalam bentuk bilateral maupun multilateral mengacu pada kebijakan politik luar negeri bebas-aktif, dan membangun kepercayaan (*confidence building measures/CBM*), pembangunan kapasitas (*capacity building*), turut serta dalam mewujudkan perdamaian, pelatihan dan Pendidikan, serta upaya-upaya dialog strategis pertahanan, dialog keamanan dan kemitraan strategis kebijakan pemerintah (Kemhan RI, 2015, p. 42). Sehingga penulis beranggapan keberhasilan dari diplomasi pertahanan selanjutnya dapat dilihat melalui indikator diplomasi pertahanan yang di jelaskan oleh Cottey dan Forster yang mana indikator tersebut merupakan tujuan atau sasaran dari diplomasi pertahanan, dan penulis berasumsi bahwa konsep dari Cottey dan Forster relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat sejauh mana keberhasilan diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda, yang sekaligus juga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

1.8. KERANGKA KONSEPTUAL

Diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster kemudian terbagi menjadi tiga bagian yang merupakan butir-butir yang menjelaskan mengenai tujuan/goals dari diplomasi pertahanan itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. *Strategic Engagement*

Strategic Engagement atau *kerjasama strategis* merupakan dimensi dari konsep diplomasi yang berkenaan pada pengadaan hubungan kerjasama yang menunjukkan adanya komitmen kerjasama pertahanan, dengan tujuan untuk mendukung adanya keadaan damai dan kestabilan dalam hubungan antar negara, sekaligus usaha untuk meminimalisir peluang terjadinya konflik antar negara. Terciptanya kesepakatan atau komitmen kerjasama pertahanan menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan berhasil mencapai tujuan dan sasaran pada dimensi kerjasama strategi.

2. *Promoting Democratic Civil-Military Relations*

Promoting democratic civil-military relations, pada bagian ini diplomasi pertahanan diharapkan dapat mendorong nilai-nilai demokrasi yang di dalamnya terdapat proses pengembangan institusi, norma yang mengarah pada nilai demokrasi. Bila dimensi ini terdapat dalam hubungan kerjasama diplomasi pertahanan maka tujuan/sasaran dari diplomasi pertahanan tercapai.

3. *Enhancing Peacekeeping Capabilities*

Enhancing peacekeeping capabilities atau pengembangan kapabilitas perdamaian, merupakan dimensi yang menjelaskan tujuan diplomasi pertahanan sebagai cara untuk mendorong terjaganya kestabilan kawasan (namun tidak terbatas pada hubungan Kerjasama regional), perdamaian melalui kerjasama pertahanan yang didasari pada proses *confidence building*, seperti yang terdapat pada dimensi kerjasama strategis. Sehingga bila terdapat unsur tersebut pada hubungan diplomasi pertahanan maka dapat dikatakan diplomasi pertahanan tersebut sesuai sasaran/tujuan atau efektif.

1.9. KERANGKA PEMIKIRAN

Uraian yang sebelumnya telah dibahas memberi pemahaman mengenai diplomasi dan khususnya aktivitas diplomasi pertahanan yang dapat juga dikaitkan pada kebijakan kerjasama bilateral pemerintah. Sehingga pemikiran-nya adalah apabila konsep diplomasi pertahanan dapat menunjukkan sasaran dan tujuan, maka dapat juga secara khusus digunakan dalam melihat efektifitas diplomasi pertahanan, yaitu efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia dan Belanda yang terjadi dalam proses kerjasama pertahanan kedua negara pada

Nota Kesepahaman Kerjasama Pertahanan Republik Indonesia dan Belanda tahun 2014-2019.

Pada parameter pertama yaitu **kerjasama strategis**, komitmen kerjasama antara kedua negara dapat dilihat pada tercapainya kesepakatan kerjasama melalui MoU 2014-2019 tentang kerjasama Pertahanan. Dialog strategis NIST (Netherland-Indonesia Strategic Talks) sudah berjalan 3 sesi (2016, 2017, dan 2018). Kerjasama pembuatan Kapal, dan penyerahan PKR-1/KRI R.E Martadinata-331 dan PKR-2/KRI I Gusti Ngurah Rai-332.

Pada parameter kedua **promosi nilai demokrasi pada hubungan sipil-militer**, indikasi tercapainya sasaran pada parameter kedua ialah adanya peran Kementerian Pertahanan menjadi lembaga pemerintahan dalam mengendalikan kegiatan militer Kebijakan militer diatur oleh Kementerian Pertahanan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) menjadi pengawas kebijakan pertahanan yang di keluarkan oleh Kementerian Pertahanan Tujuan Nasional pertahanan Indonesia merujuk pada UUD NRI 1945.

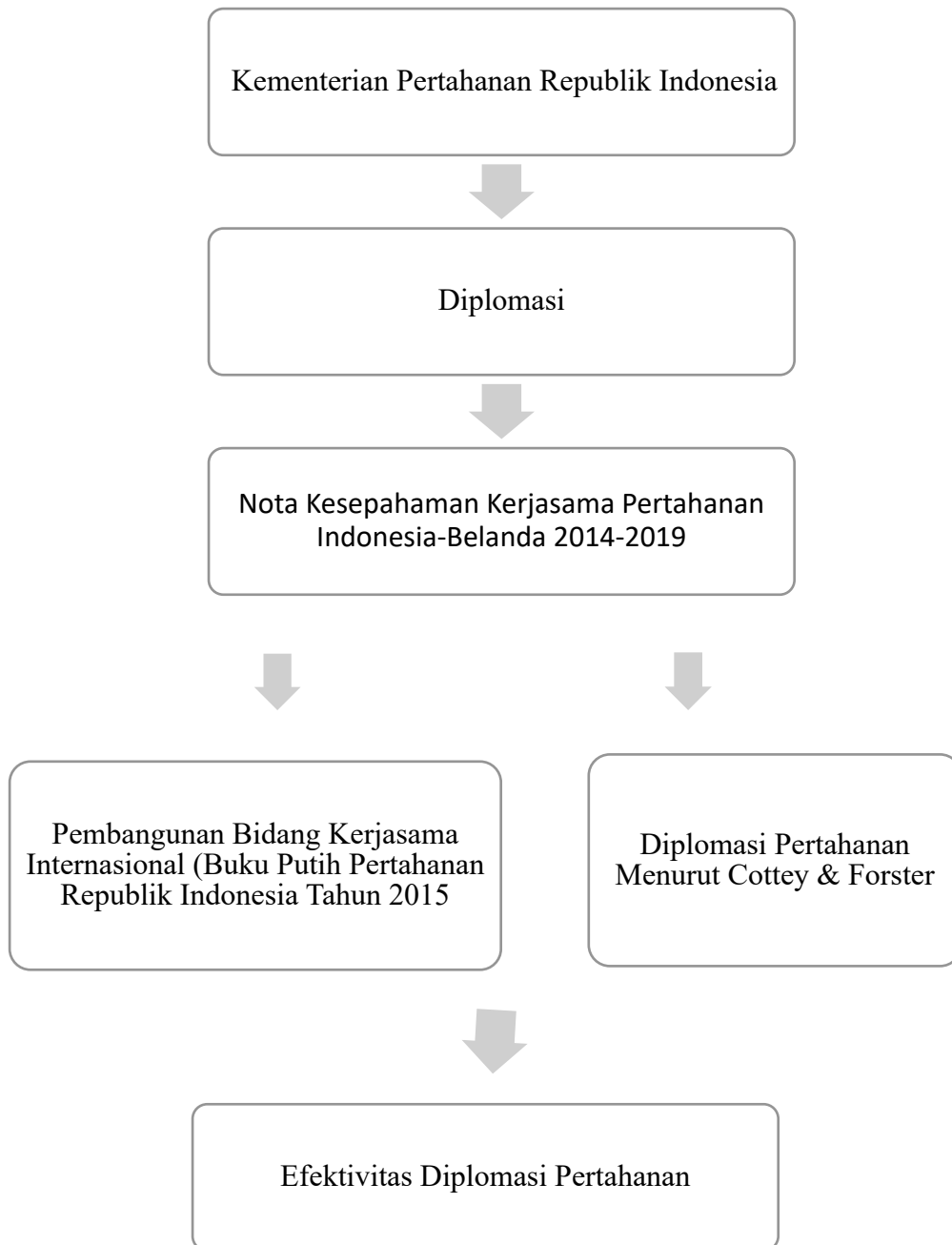
Parameter ketiga atau terakhir **kapabilitas dalam usaha mengembangkan perdamaian**, indikasi sasaran ini terpenuhi ialah adanya kerjasama yang terjalin atas dasar keinginan untuk menciptakan atau mendorong terwujudnya perdamaian, pada hubungan kerjasama Indonesia dan Belanda dapat dilihat pada nota kesepahaman kerjasama pertahanan kedua negara didasari pada komitmen untuk menjaga perdamaian global dan bukan didasari pada niatan yang bersifat ofensif (menyerang) namun pertimbangan dalam kesepakatan MoU Kerjasama Pertahanan Indonesia-Belanda di dasarkan pada pertimbangan perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam melihat efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia dan Belanda penulis menggunakan konsep dari Cottey dan Forster. Namun penulis juga ingin mengaitkan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan kebijakan pembangunan pertahanan di bidang kerjasama internasional yang merujuk pada Buku Putih Pertahanan RI tahun 2015,

Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015 menjelaskan bahwa pembangunan kerjasama internasional diarahkan pada peningkatan kerjasama pertahanan secara bilateral maupun multilateral mengacu pada kebijakan politik luar negeri bebas-aktif, sekaligus memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bentuk kerjasama internasional yang dimaksud ialah kerjasama yang **membangun kepercayaan (*Confidence Building Measure/CBM*), pembangunan kapasitas (*capacity building*), ikut serta mewujudkan perdamaian dunia, Pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis sesuai kebijakan pemerintah** (Kemhan RI, 2015, p. 42).

Secara ringkas kebijakan pembangunan pada kerjasama di bidang internasional yang terdapat pada Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2015, memiliki postur yang serupa dengan konsep diplomasi pertahanan Cottey dan Forster, sehingga dapat disimpulkan apabila konsep diplomasi pertahanan yang diajukan oleh Cottey dan Forster terpenuhi, maka sinergi antara konsep diplomasi pertahanan dan kepentingan nasional pertahanan Indonesia telah selaras, dan menunjukkan efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia yang sesuai dengan tujuan/sasaran dari diplomasi pertahanan.

Kerangka pemikiran yang sebelumnya telah dijabarkan di atas, menghasilkan alur pemikiran yang berupa sebuah gambaran pada gambar 1.3.



Gambar 1. 3 Alur Pemikiran

1.10. HIPOTESIS DESKRIPTIF

Berdasarkan uraian pemikiran dan data yang telah dijelaskan sebelumnya penulis mengajukan rumusan hipotesis deskriptif pada penelitian ini yaitu diplomasi pertahanan Indonesia pada hubungan kerjasama bilateral Indonesia-Belanda dalam mencapai kepentingan nasional pertahanan Indonesia yang terdapat pada kerjasama nota kesepahaman kerjasama pertahanan Indonesia-Belanda tahun 2014-2019 telah terlaksana dengan efektif atau berhasil. Hipotesis deskriptif ini selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya pada penelitian sesungguhnya.

1.11. METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, untuk dapat mengelola dan juga menunjukkan cara analisis untuk menjawab rumusan masalah, maka digunakan Metode penelitian sebagai berikut.

1.11.1. Jenis Penelitian

Sumber data utama penelitian ini adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian luar Negeri Republik Indonesia, Komisi I DPR RI, dan Atase Pertahanan RI di Den Haag. Berhubung jumlah sumber data masih dalam jangkauan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian metode deskriptif kualitatif.

1.11.2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah bagian yang merupakan gambaran abstrak mengenai suatu fenomena yang berdasar dari generalisasi sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu (Masri Singarimbun, 1989). Setelah memahami definisi konsep maka terdapat beberapa konsep di dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Efektivitas Diplomasi Pertahanan yang dimaksud pada penelitian ini ialah, keberhasilan aktivitas diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia, dengan melihat terpenuhi atau tidaknya tujuan/sasaran dari diplomasi pertahanan
- 2) Diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster terbagi menjadi tiga butir-butir yang menjelaskan mengenai tujuan/*goals* dari diplomasi pertahanan itu sendiri, yaitu sebagai berikut:
 - a) *Strategic Engagement Promoting*
 - b) *Democratic Civil-Military Relations*
 - c) *Enhancing Peacekeeping Capabilities*.
- 3) Pembangunan bidang kerjasama internasional merujuk pada Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015. Bentuk kerjasama internasional yang dimaksud ialah kerjasama yang membangun kepercayaan (*Confidence Building Measure/CBM*), pembangunan kapasitas (*capacity building*), ikut serta mewujudkan perdamaian dunia, Pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis sesuai kebijakan pemerintah
- 4) Nota Kesepahaman Kerjasama Pertahanan Republik Indonesia dan Belanda tahun 2014-2019 adalah nota kesepahaman yang di sepakati oleh Indonesia dan Belanda sebagai bukti tertulis adanya ikatan kerjasama di bidang kerjasama pertahanan dan sekaligus menjadi batasan pembahasan pada penelitian.
- 5) Hubungan Bilateral Indonesia dan Belanda, Indonesia diwakili oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai lembaga yang berkepentingan dalam segala kegiatan terakait Nota Kesepahaman Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Belanda tahun 2014-2019.

1.11.3. Fokus Penelitian

Setelah memahami dan mengetahui definisi konsep diplomasi pertahanan dan parameter atau indikator yang menunjukkan dari tujuan dari diplomasi pertahanan, maka penulis menjelaskan fokus penelitian ini untuk menjelaskan efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia pada tabel 1.6.

Tabel 1. 7 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Efektivitas Diplomasi Indonesia (Studi Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda Dalam Mencapai Kepentingan Pertahanan Indonesia)	a.	1. Komitmen kerjasama	Kesepakatan kerjasama militer
		2. Transparansi militer	1. Diskusi tingkat tinggi mengenai kebijakan pertahanan
			2. Doktrin militer yang mengarah pada keinginan defensif (bertahan) bukan ofensif (menyerang)
		3. Persamaan persepsi kepentingan pertahanan	Menguatkan persamaan kepentingan dalam kerjasama pertahanan
		4. Menyamakan pola pikir dalam kerjasama	Mengubah pandangan negatif pada mitra kerjasama menjadi pandangan yang bersifat positif
		5. Sosialisasikan kegiatan kerjasama militer	Tindakan solidaritas kerjasama untuk rasa saling percaya pada hubungan kerjasama pertahanan
	b.	6. Asistensi kerjasama militer	1. Pertukaran perwira militer
			2. Pendidikan dan pelatihan
			3. Konferensi
		1. Pengendalian politisi sipil terhadap militer	1. Konstitusi yang memiliki prinsip demokratis
			2. Menciptakan rentetan kebijakan yang merefleksikan prinsip demokratis
			3. Menciptakan institusi yang mengatur tentang pertahanan
		2. Pengendalian demokratis sipil terhadap kebijakan pertahanan	1. Manajemen kebijakan pertahanan
			2. Pengembangan manajemen kebijakan pertahanan
			3. Pengendalian terhadap anggaran pertahanan
			4. Pelatihan bagi petugas sipil

			3.	Pengawasan oleh lembaga Legislatif/parlemen	1.	Menciptakan parlemen urusan kerjasama luar negeri dan komite pertahanan/keamanan
					2.	Lembaga legislative berperan dalam mengijinkan Penyetujuan undang-undang oleh parlemen
					3.	Anggaran Pertahanan
					4.	penggunaan militer baik di dalam dan luar negeri
					5.	Memperbolehkan parlemen/legislative ataupun komitennya untuk mendapatkan informasi
					6.	Mendengarkan dan melakukan interview terhadap personel
					7.	Publikasi laporan parlementer
			4.	Peraturan hukum berlandaskan kemanusiaan dan keadilan	1.	Pengajuan pasukan bersenjata dan eksekutif yang berlandaskan pada aturan hukum
					2.	Membentuk sistem hukum dan sistem pengadilan yang relevan
					3.	Mengembangkan budaya yang menghormati hak kemanusiaan di dalam angkatan bersenjata
					4.	Komitmen untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan penyalahgunaan oleh pasukan bersenjata
			5.	Keterkaitan lembaga sipil	1.	Transparansi dan kebebasan dalam mendapatkan informasi terkait anggaran pertahanan
					2.	Pengembangan isntitusi riset independen, <i>think-tank</i> , advokasi, grup kampanye

					3. Media independen dan bebas yang memiliki keahlian pada bidang keamanan dan pertahanan
	c.	<i>Peacekeeping Capabilities</i> (kapabilitas dalam pemeliharaan perdamaian)	1.	Melibatkan kerjasama militer pada isu perdamaian	Partisipasi angkatan bersenjata dalam aktivitas perdamaian dunia
			2.	Mendorong nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan pada kebijakan kerjasama pertahanan	Komitmen menjaga perdamaian dan keamanan global

1.11.4. Jenis dan Sumber Data

Ditinjau dari jenisnya data yang akan diperoleh pada penelitian ini berasal dari sumber yang masih dapat dijangkau yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Komisi I DPR RI, dan Atase Pertahanan RI di Den Haag, maka jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Al Fatih ada 2 hal terkait data, yaitu berdasarkan pada jenisnya dan sumber perolehannya (Alfatih, 2015, p. 67)

1. Berdasarkan jenisnya yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yaitu:

- Data kualitatif yang berupa kata, frase atau kalimat.
- Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau gambar (*numeric and graphic*).

2. Berdasarkan dari sumber perolehannya, yaitu data primer dan data sekunder.

- Data primer merupakan data yang dikumpulkan/diperoleh langsung dari sumbernya, seperti data yang didapat dari wawancara terstruktur (*structured interview*), penyebaran kuisioner, observasi lapangan, atau secara perhitungan.
- Data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak langsung (yang diperoleh dari pihak kedua atau ketiga, seperti data yang diperoleh dari dokumen: laporan, catatan, jurnal, majalah, papan tulis, makalah, prosiding, arsip dan lain sebagainya

SUMBER DATA

Dalam proses pengumpulan data peneliti akan melakukan pengumpulan data dalam wujud data primer dan sekunder:

- 1) Data primer merupakan data yang akan diperoleh dari wawancara mendalam, terkait topik pembahasan pada penelitian ini, untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan secara konkrit agar dapat berkontribusi terhadap penelitian ini. Data wawancara akan bersumber dari staf/petugas di Ditjen Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, staf/petugas sub-direktorat Eropa I Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, anggota Komisi I DPR RI dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Den Haag.

- 2) Data sekunder merupakan data yang akan diperoleh dari, studi kepustakaan (buku, jurnal, dan laporan penelitian) dan juga data yang diperoleh dari dokumen resmi sub-direktorat Eropa I dan Ditjen Kerjasama Internasional, media elektronik, cetak, dan lain-lain, yang berkaitan pada topik penelitian.

1.11.5. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang akurat dan kredibel untuk penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) Wawancara mendalam (*in depth interview*): melakukan tanya jawab panjang lebar antara peneliti dan sumber data, yang dibantu dengan pedoman wawancara
- 2) Studi dokumentasi: memperoleh data yang dapat berkontribusi terhadap penelitian yang diperoleh dari, buku, jurnal, laporan penelitian, maupun arsip-arsip yang tersedia dan juga melalui media elektronik seperti website resmi dan dokumen elektronik yang diperoleh dari internet.

1.11.6. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data perlu dicapai untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh. Menurut Sugiyono, uji keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *confirmability* (obyektivitas). Uji kredibilitas data yakni dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi lain, dan *member check* (Sugiyono, 2012, p. 366). Pada penelitian ini lebih mengutamakan uji kredibilitas data yaitu dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi lain, dan *member check*.

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2016, p. 270) Dalam

penelitian ini triangulasi sumber yang dilakukan penelitian ialah dengan melakukan wawancara terhadap setiap informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama.

1.11.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya di dapat pada bagian rumusan masalah, ialah dengan menggunakan Teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dimana peneliti hanya akan menggali data dan informasi yang berasal dari sumber data mengenai faktor-faktor yang memiliki kaitan dan mempengaruhi efektivitas diplomasi pertahanan yang ada pada hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Belanda. Proses dan tahapan menurut Miles dan Huberman (Matthew B. Miles, 1994, p. 16) adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan selanjutnya akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, atau mencarinya bila diperlukan.

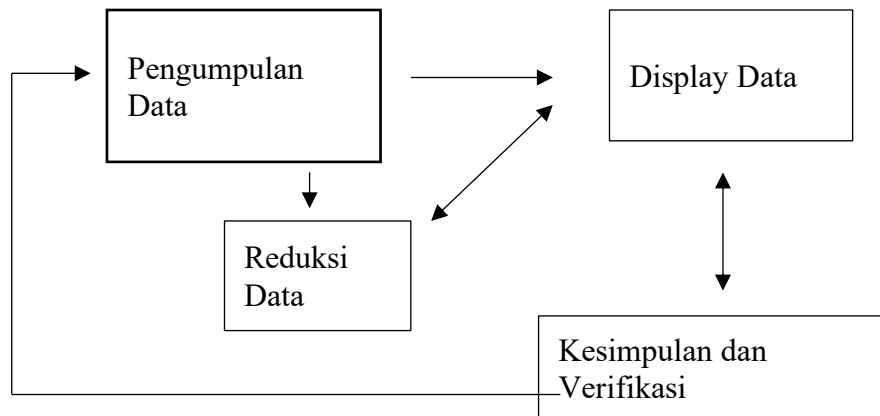
2. Penyajian Data (*Data Display*)

Sesudah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam teks yang bersifat naratif, bagan dan matriks. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan apa yang akan dikerjakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah berikutnya ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

Langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini selanjutnya akan disajikan pada gambar 1.4



Gambar 1. 4 Teknik Analisis Data Kualitatif Efektivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia [Studi Terhadap Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda dalam Mencapai Kepentingan Pertahanan Indonesia] (Sumber: Miles dan Huberman, p.19)

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, S., Blok, S., Swartbol, R., Agung, I. G., & Puja, W. (2019). *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia SNAPSHOT HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – BELANDA*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Alfatih, A. (2015). *Modul Metodologi Penelitian (Research Methodology)*. Universitas Sriwijaya.
- Andrew Cottey, A. F. (2004). Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance. In Tim Huxley (Ed.), *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance* (Adelphi Pa). Routledge.
- Barston, R. . (2014). *Modern Diplomacy* (Fourth). Routledge.
- Burchill, S. (2005). The national interest in international relations theory. In *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave.
<https://doi.org/10.1057/9780230005778>
- Detiknews. (2012). *KRI Sultan Iskandar Muda, Si Pengawal Perdamaian Dunia*.
https://news.detik.com/berita/d-1904765/kri-sultan-iskandar-muda-si-pengawal-perdamaian-dunia?_ga=2.153898360.1302151472.1601267187-281668669.1597219610
- Detiknews. (2014). *KRI Sultan Hasanuddin-366, Seperti Apa Kecanggihan Tempurnya?*
<https://news.detik.com/berita/d-2769620/kri-sultan-hasanuddin-366-seperti-apa-kecanggihan-tempurnya>
- Drab, L. (2018). Defence Diplomacy – an Important Tool for the Implementation of Foreign Policy and Security of the State. *Security and Defence Quarterly*, 20(3), 57–71. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5152>
- Dzikri, I. (2016). Negara dan Kapasitas Adopsi Inovasi: Studi Kasus Transformasi Pertahanan Indonesia Periode 1998-2014. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18(2), 131. <https://doi.org/10.7454/global.v18i2.305>
- Fris, J. (2013). *NEITHER STAUNCH FRIENDS NOR CONFIRMED FOES” NEW ZEALAND’S DEFENCE DIPLOMACY IN ASIA* [Victoria University Of Wellington].
<http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/3109/thesis.pdf?sequence=2>
- G.R. Berridge, A. J. (2001). A dictionary of diplomacy. In *Choice Reviews Online*. Palgrave. <https://doi.org/10.5860/choice.41-5029>
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., James H Donnelly, J., & Konopaske, R. (2012). *Organization Behavior, Structure and Processes* (P. Ducham (ed.); 14th ed.). Mc Graw Hill.
- Gindarsah, I. (2015). INDONESIA’S DEFENCE DIPLOMACY: HARNESSING THE HEDGING STRATEGY AGAINST REGIONAL UNCERTAINTIES. *RSIS Working Paper*, 293, 19.
- Global Fire Power. (2020). *Indonesia Military Strength (2020)*.
- Greater, J. (2016). *KRI Diponegoro Kapal Perang Kebanggaan RI Dengan Segudang Misi Internasional*. <https://jakartagreater.com/79263/kri-diponegoro-365-kapal-perang-kebanggaan-ri-dengan-segudang-misi-internasional/>
- Greater, J. (2019). *KRI Frans Kaiseipo-368 Akan Openship di Cilacap*.
<https://jakartagreater.com/kri-frans-kaiseipo-368-akan-openship-di-cilacap/>
- Hartono, B. (2011). *Telaah Mengenai Diplomasi Pertahanan : Perkembangan dan Varian*. 1–11.
https://www.academia.edu/8260395/Telaah_Mengenai_Diplomasi_Pertahanan_Perembangan_dan_Varian
- Holsti, K. (2016). *Major Texts on War, the State, Peace, and International Orde* (M. Dr.

- Hans Günter Brauch (ed.); SPRINGER B). Springer. <https://doi.org/0.1007/978-3-319-28818-5>
- Joseph Frankel. (1970). *Key Concept in Political Science : National Interest*. Palgrave. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-00942-8>
- Joseph S. Nye, J. (2005). *Soft Power The Means to succes in World Politics*. PublicAffairs.
- Joseph S. Nye, J. (2011). *The Future of Power* (1st ed.). PublicAffairs.
- Karyono, S. (2016). KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN BELANDA DALAM BIDANG PERTAHANAN TAHUN 2013-2014. *JOM FISIP UNRI*, 9, 1689–1699.
- Kemhan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Koerner, W. (2006). *Security Sector Reform: Defence Diplomacy*. May.
- M. Smith, J. (2018). Asia's Quest for Balance: China's Rise and Balancing in the Indo-Pacific. In *Contemporary Southeast Asia* (Issue 1). Rowman & Littlefield. <https://doi.org/10.1355/cs41-1j>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Masri Singarimbun, S. E. (1989). *Metode Penelitian Survai*. PT Pustaka LP3ES.
- Matthew B. Miles, A. M. H. (1994). *Analisis Data Kualitatif* (T. R. Rohidi (ed.)). Universitas indonesia.
- Michael Graham Fry, Erik Goldstein, R. L. (2002). Guide to International Relations and Diplomacy. In R. L. Michael Graham Fry, Erik Goldstein (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Continuum.
- Morgenthau, H. (1997). *Morgenthau, Hans Joachim _ Thompson, Kenneth W. - Politics among nations _ the struggle for power and peace-McGraw-Hill* (1997) (p. 641). Peking University Press.
- Morgenthau, H. J. (2012). *The Concept of the Political* (F. R. Behr, Harmut (ed.)). Palgrave. <https://doi.org/0.1057/9781137002518>
- Multazam, A. (2010). *Diplomasi pertahanan indonesia terhadap korea selatan feriode 2006-209* [Universitas Indonesia]. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135850-T 28012-Diplomasi pertahanan-Pendahuluan.pdf>
- Nations, U. (1961). *Vienna Convention 1961 On Diplomatic Relation*. 500(April 1961), 1–18. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf
- Nugraha, P. (2016). Studi Kelayakan PT. PAL Indonesia (Persero) Untuk Pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal (Pkr). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(3), 255. <https://doi.org/10.22146/jkn.16354>
- Ohnesorge, H. W. (2020). Soft Power The Forces of Attraction in International Relation. In X. Gu (Ed.), *Региональное Управление: Модели, Технологии, Коммуникации. Ч. 1. — Екатеринбург, 2013*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-29922-4>
- Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman, Diego Lopes da Silva, Nan Tian, A. K. (2020). Trends in World Military Expenditure, 2019. *Stockholm International Peace Research Institute Fact Sheet, April*, 1–8.
- RI. (2014). *NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJASAMA TERKAIT PERTAHANAN*.
- RI, Kemenkumham. (2017). *HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA*

- TENTANG KERJASAMA TERKAIT PERTAHANAN.*
<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20180809-040058-6214.pdf>
- RI, Kemhan. (2014). *RI – Belanda Tandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerjasama Pertahanan.*
- RI, Kemhan. (2020). *RAKORNIS DITJEN KUATHAN KEMHAN TA. 2020 TANGGAL 14 FEBRUARI 2020.* <https://www.kemhan.go.id/kuathan/2020/02/14/rakornis-ditjen-kuathan-kemhan-ta-2020-tanggal-14-februari-2020.html>
- RI, Kemlu. (2013). *JOINT DECLARATION BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS ON A COMPREHENSIVE PARTNERSHIP.* Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi Struktur Design & Aplikasi* (J. Udaya (ed.); 3rd ed.). Arcan.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational Behaviors. In S. Yagan (Ed.), *Chemical and Petroleum Engineering* (15th ed., Vol. 27, Issue 5). Pearson Education.
- Robert Jackson, G. S. (2013). *Introduction to International Relations Theories and Approaches* (5th ed.). OXFORD University Press.
- Satu, B. (2012). *Beli Kapal Perang Belanda, Indonesia Incar Transfer Teknologi.* <https://www.beritasatu.com/beritasatu/archive/52231/beli-kapal-perang-belanda-indonesia-incar-transfer-teknologi>
- Singh, B., & Tan, S. S. (2011). *From ‘Boots’ to ‘Brogues’: The Rise of Defence diplomacy in Southeast Asia* (Issue 21). RSIS Monograph Singapore.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode).* Alfabeta.
- Sukadis, B. (2016). Reformasi di Kementerian Pertahanan RI. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(2), 189–204.
- Syawfi, I. (2009). *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008).* Universitas Indonesia.
- Winger, G. (2014). The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy. In *Institut für die Wissenschaften vom Menschen Institute for Human Sciences* (Vol. 33). Institut für die Wissenschaften vom Menschen Institute for Human Sciences.